



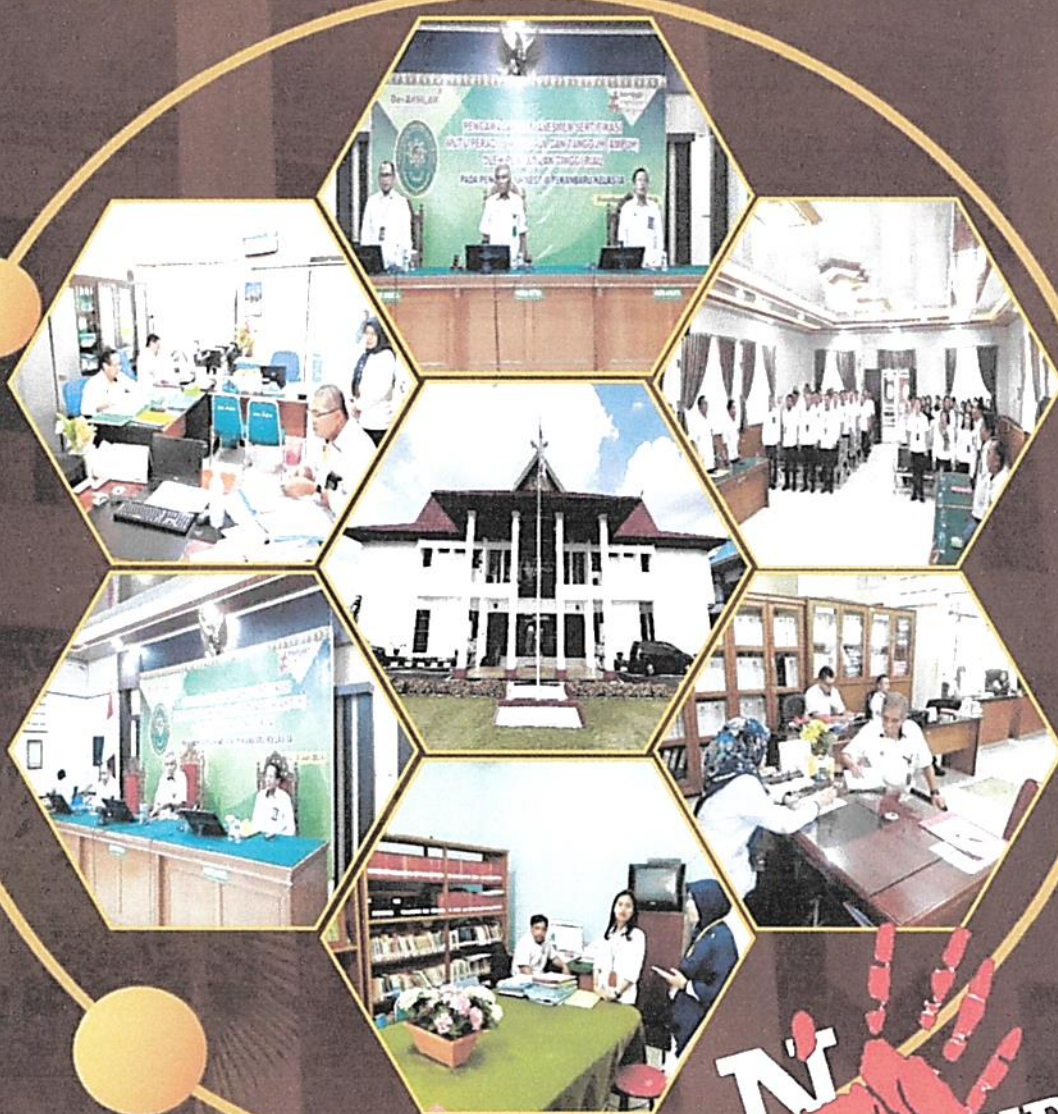
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
PENGADILAN TINGGI RIAU



BerAKHLAK

#bangga
melayani
bangsa

LAPORAN HASIL PENGAWASAN DAERAH PENGADILAN NEGERI PEKANBARU TANGGAL 10 - 11 JUNI 2024



**N
K
RUPSI**

PENGADILAN TINGGI RIAU
JALAN JENDERAL SUDIRMAN NO.315 PEKANBARU - RIAU 28131
TELP. (0761) 33768 - FAX. 0761 21523



PENGADILAN TINGGI RIAU



PT-RIAU.GO.ID



02853-5800-0101

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT, Laporan Hasil Pengawasan telah selesai disusun sebagai wujud pertanggungjawaban kami sebagai Tim Pengawas yang ditunjuk berdasarkan surat tugas Ketua Pengadilan Tinggi Riau Nomor 739/KPT.W4-U/ST.KP7.1/V/2024 Tanggal 22 Mei 2024

Sebanyak 5 (lima) jenis kegiatan pada Pengadilan Negeri Pekanbaru yang merupakan ruang lingkup pengawasan terdiri dari : Manajemen Peradilan, Administrasi Perkara, Administrasi Persidangan dan Pelaksanaan Putusan, Administrasi Umum, serta Kinerja Pelayanan Publik, telah dilaksanakan oleh Tim Pengawas selama 2 (dua) hari sejak tanggal 10 s.d. 11 Juni 2024, dan hasilnya disusun dalam bentuk laporan tertulis serta diserahkan kepada pimpinan Pengadilan Negeri Pekanbaru dan Pengadilan Tinggi Riau untuk selanjutnya ditindak lanjuti Pengadilan Negeri Pekanbaru dalam waktu yang ditentukan sesuai perjanjian atau kontrak kerja.

Tindaklanjut dari laporan ini merupakan bahan monitoring dan evaluasi yang merupakan bukti tindak pengawasan yang berkelanjutan bagi warga Pengadilan Negeri Pekanbaru dan pimpinan Pengadilan Tinggi Riau untuk menentukan nilai capaian yang telah dilakukan atau prestasi yang telah diperoleh, dan selanjutnya dipergunakan sebagai dasar perencanaan kegiatan dari Pengadilan Negeri Pekanbaru yang akan datang yang senantiasa diharapkan hasil yang lebih baik daripada masa yang telah lalu.

Demikian laporan ini dibuat atas keadaan yang sebenarnya dengan harapan dapat bermanfaat untuk mencapai tujuan pengadilan yang bermuara pada meningkatnya kualitas pelayanan serta pelaksanaan birokrasi yang efektif, efisien, bersih, dan akuntabel menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

Rengat, 11 Juni 2024

Tim Pengawas

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Dasar Hukum	1
B. Maksud dan Tujuan.....	2
C. Ruang Lingkup	2
D. Metodologi Pengawasan	2
E. Tahap Pengawasan.....	3
F. Jangka Waktu Pelaksanaan	3
G. Tim Pengawas	3
BAB II. HASIL TEMUAN	
A. Manajemen Peradilan	5
B. Administrasi Perkara.....	8
a. Kepaniteraan Perdata	8
b. Kepaniteraan Pidana.....	10
c. Kepaniteraan Hukum	15
d. Kepaniteraan Perdata Khusus PHI.....	21
e. Kepaniteraan Pidana Khusus Tipikor	22
C. Administrasi Persidangan dan Pelaksanaan Putusan	23
D. Administrasi Umum	24
a. Umum dan Keuangan.....	24
b. Kepegawaian dan Ortala	32
c. Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan	33
E. Kinerja Pelayanan Publik	34
BAB III. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI	
A. Kesimpulan.....	38
B. Rekomendasi	38
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. DASAR HUKUM

1. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penegakan Disiplin Kerja Hakim pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya.
2. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya.
3. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (*Whistleblowing System*) di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya.
4. Maklumat Ketua Mahkamah Agung Nomor 1 / Maklumat/KMA/IX/2017 tentang Pengawasan dan Pembinaan Hakim, Aparatur Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya
5. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/080/SK/VII/2006 tanggal 24 Agustus 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Lembaga Peradilan.
6. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/096/SK/X/2006 tentang Tanggung jawab Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama dalam melakukan Pengawasan.
7. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: 145/KMA/SK/IV/2007 tentang Memberlakukan Buku IV Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Badan-Badan Peradilan.
8. Buku IV Mahkamah Agung RI Tahun 2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Badan-Badan Peradilan ;
9. Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum.
10. Surat Tugas Ketua Pengadilan Tinggi Riau Nomor: 739/KPT.W4-U/ST.KP7.1/V/2024 tanggal 22 Mei 2024

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud Pengawasan:

- a. Menjaga terselenggaranya manajemen peradilan dengan baik dan benar.
- b. Menjaga terwujudnya tertib administrasi peradilan.
- c. Menjaga pencapaian target yang telah ditetapkan sesuai dengan program kerja.
- d. Menjaga citra lembaga peradilan yang bermartabat dan terhormat.
- e. Menjaga citra aparat peradilan yang professional, bersih dan berwibawa.
- f. Meningkatkan kinerja peiayanan publik.
- g. Meningkatkan disiplin dan prestasi kerja guna pencapaian pelaksanaan tugas yang optimal.
- h. Mencegah terjadinya penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang.

2. Tujuan Pengawasan:

- a. Menopang kerangka manajemen peradilan yang baik.
- b. Menciptakan kondisi yang mendukung kelancaran, kecepatan, dan ketepatan pelaksanaan tugas sesuai tugas pokok dan fungsi peradilan.
- c. Memberikan masukan berupa data, fakta, pertimbangan, dan rekomendasi sebagai bahan untuk pengambilan keputusan.

C. RUANG LINGKUP

1. Manajemen Peradilan
2. Administrasi Perkara
3. Administrasi Persidangan dan Pelaksanaan Putusan
4. Administrasi Umum
5. Kinerja Pelayanan Publik

D. METODOLOGI PENGAWASAN

Pengawasan dilakukan dalam bentuk pemeriksaan, yaitu dengan mekanisme pengamatan yang dilakukan dan dekat, dengan cara mengadakan perbandingan antara yang telah atau akan dilaksanakan, dengan yang seharusnya dilaksanakan menurut ketentuan peraturan yang berlaku.

E. TAHAP PENGAWASAN

1. Pertemuan awal dengan pimpinan objek pemeriksaan.
2. Mempelajari data-data dan melakukan prosedur pemeriksaan dengan analisa-analisis teknik-teknik pemeriksaan.
3. Evaluasi pengendalian intern/sistem manajemen objek pemeriksaan.
4. Pengujian lapangan tentang validitas (keabsahan), keakuratan nilai/data dan kegiatan objek pemeriksaan sebagaimana tersebut pada butir 3 diatas.
5. Melakukan pemeriksaan terhadap:
 - a. Register perkara, buku keuangan, berkas perkara tertentu, surat-surat dan dokumen lainnya.
 - b. Sarana dan prasarana fisik, dengan cara observasi dan review dokumen/data.
 - c. Pejabat penanggung jawab, dengan cara melakukan wawancara atau tanya jawab.
 - d. Kondisi umum secara kualitatif (kebersihan, kerapian, ketertiban, dan kenyamanan).
 - e. Kondisi umum secara normatif (tertib administrasi, kedisiplinan, kepemimpinan, pembinaan dan etos kerja).
 - f. Administrasi umum (kepegawaian, keuangan, inventaris, tertib persuratan perkantoran dan perpustakaan).

F. WAKTU PELAKSANAAN

Sesuai surat tugas Ketua Pengadilan Tinggi Riau Nomor 739/KPT.W4-U/ST.KP7.1/V/2024 Tanggal 22 Mei 2024, jangka waktu pelaksanaan Pengawasan 2 (dua) hari tanggal 10 s.d. 11 Juni 2024.

G. TIM PENGAWAS

1. Nelson Samosir, S.H., M.H. sebagai Ketua Tim
2. Noer Ali, S.H. sebagai Anggota
3. Hendri, S.H, M.H. sebagai Anggota
4. Tantowi Jauhari, S.H., M.H. sebagai Anggota
5. M. Jamalis, S.H. sebagai Anggota
6. Roby Hidayat, S.T. sebagai Anggota

7. Amirin, S.H. sebagai Anggota
8. Sesiliya Rahayu, S.E. sebagai Anggota
9. Fadhliamin, S.Sl. sebagai Anggota
10. Rommy Saputra, S.E. sebagai Anggota
11. Adetia Pratama, A.Md. sebagai Anggota
12. Yudhi Darmawan, S.E. sebagai Anggota

BAB II
HASIL TEMUAN

NO	KONDISI	KRITERIA	SEBAB	AKIBAT	REKOMENDASI
I. MANAJEMEN PERADILAN					
1.	Hakim Pengawasan Bidang Pidana, Tipikor dan PHI belum melakukan pengawasan bidang pada minggu pertama (tanggal 3 s.d. 7 Juni 2024)	1. Lembar Asesmen Mutu Unggul dan Tangguh (AMPUH) Pengadilan Negeri kelas IA Tahun 2024 yang terlampir dalam Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI Nomor 142/DJU/SK.OT1.6/II /2024 Tentang Pemberlakuan Program Sertifikasi Mutu Peradilan Unggul dan Tangguh (AMPUH) di Lingkungan Peradilan Umum	Pengawasan bidang tidak terjadwal dengan baik, jika terkendala terkait waktu perlu dibuatkan jadwal pengganti	Pengawasan bidang setiap 1 (satu) minggu sekali (1x) tidak terlaksana. Tidak dapat memantau proses pengawasan dan temuan serta tindak lanjut Hakim Pengawas Bidang	1. Pengawasan bidang tetap dilaksanakan setiap 1 (satu) minggu (1x) dan temuannya dituangkan dalam lembar temuan atau ketidaksesuaian dan setiap bulan dibuatkan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) 2. Dibuatkan jadwal rencana kegiatan pengawasan bidang, jika

		2. Buku IV Tentang Tata Laksana Pengawasan.(SK. KMA Nomor : KMA/080/SK/VIII/2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Lembaga Peradilan.) 3. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: 145/KMA/SK/IV/2007 tentang Memberlakukan Buku IV Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Badan-Lingungan Badan-Peradilan			tidak on schedule diganti dengan hari lain
	1. Untuk informasi yang dituangkan dalam setiap loket atau meja terkait jumlah yang dilayani telah tersedia tetapi untuk Laporan Hasil Pengawasan bidang PTSP dan Monevnya agar dibuatkan	1. Keputusan Direktur Jenderal Peradilan Umum Nomor 114/DJU/SK.HM1.1.1 /I/2024 tentang Pembaruan Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)	Belum mempedomani secara menyeluruh terkait Pembaruan Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)	Kurang teliti dan tertib terkait penulisan format Laporan Pengawasan pada PTSP dan Monevnya	Agar menyesuaikan format laporan mempedomani Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor
	2.				

		laporannya sesuai dengan format dan pedoman terbaru. 2. Perhatikan pada dasar pelaksanaan ditambah aturan pedoman terbaru 3. Pada layanan dimeja hukum pada laporan masih tertera peraturan yang lama terkait informasi yaitu masih KMA 1-144 seharusnya sudah KMA 2-144	Pada Pengadilan Tinggi Pengadilan Negeri. 2. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan.			114/DJU/SK.HM1. 1.1/2024 tentang Pembaruan Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.
3.	Implementasi SOP belum dilakukan monitoring dan evaluasi, dan belum dilakukan uji petik minimal 5 kegiatan	1. Standar Sertifikasi Mutu Pengadilan Unggul dan Tangguh (AMPUH) Pengadilan Tingkat Pertama badilum 2. Pedoman Pembangunan Zona Integritas khususnya terkait dengan komponen pengungkit dan reform Area II	1. Standar checklist Mutu Pengadilan Unggul Tangguh Pertama	Tidak dijadwalkan terkait monev implementasi SOP	Agar dijadwalkan monev implementasi SOP beserta pelaksanaan uji petiknya minimal satu tahun sekali	Segera dijadwalkan dan dilaksanakan monev implementasi SOP beserta pelaksanaan uji petiknya minimal satu tahun sekali
4.	Belum dilaksanakan Rapat rutin secara	Standar Sertifikasi	checklist Mutu	Tidak dibuatkan standar jadwal rapat	Tidak tersedia eviden	Agar dapat melaksanakan

	berkala secara berjenjang dimulai dari satuan terkecil (panmud)	Pengadilan Unggul dan Tangguh (AMPUH) Pengadilan Tingkat Pertama badilum	rutin tiap bagian untuk menjadi pedoman dalam pelaksanaan rapat secara berjenjang	dokumentasi rapat rutin secara berjenjang dan kontrol kinerja dari satuan terkecil tidak terlaksana	Rapat rutin secara berkala secara berjenjang dimulai dari satuan terkecil sehingga dapat secara cepat menindaklanjuti ketidaksesuaian yang dialami dalam masing-masing bidang
II. ADMINISTRASI PERKARA					
a. Kepaniteraan Perdata					
1.	Terdapat Penyelesaian Perkara Perdata melebihi 5 Bulan, Uji Petik Perkara Perdata Nomor: 317/Pdt.G/2023/PN Pbr 315/Pdt.G/2023/PN Pbr 312/Pdt.G/2023/PN Pbr	Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan	Majelis Hakim belum melaksanakan penyelesaian perkara perdata dengan baik sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014	Pencari keadilan lambat mendapatkan kepastian hukum tentang perkara perdata tersebut	Agar majelis Hakim melaksanakan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 tersebut

2.	Perkara tahun 2022 yang sudah BHT (Berkekuatan Hukum Tetap) Nomor: 6/Pdt.Eks.HT/2022/PN Pbr tidak dapat dilaksanakan eksekusi karena tenaga keamanan tidak bisa di koordinasikan oleh pemohon.	Keputusan Dirjend Badilum Mahkamah Agung R.I. Nomor: 40/DJU/SK/HM.02.3./1/2 019 tentang Pedoman Eksekusi pada Pengadilan Negeri Dalam prakteknya, pemohon yang berkoordinasi dengan pihak keamanan untuk selanjutnya melaporkan ke Ketua Pengadilan Negeri untuk pelaksanaan eksekusi.	Pemohon tidak/belum melakukan koordinasi dengan tenaga keamanan dan tidak/belum memberikan informasi kepada Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru	Eksekusi belum dapat dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Pekanbaru karena belum adanya informasi hasil koordinasi antra pemohon dengan tenaga keamanan	Agar Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru menyurati secara tegas Pemohon tersebut untuk segera berkoordinasi dengan tenaga keamanan dan segera memberikan informasi kepada Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru untuk dilaksanakan eksekusi
3.	Ditemukan dalam uji petik perkara perdata nomor: 3/Pdt.G/2024/PN Pbr, tanggal putus perkara 31 januari 2024, biaya proses terakhir pada tanggal 8 Maret 2024, namun Pengembalian Sisa Panjar pada tanggal 15 Mei 2024	1. Buku II administrasi Perkara edisi ke 7 (Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor :032/SK/IV/2006 tentang Memberlakukan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan.)	Kepaniteraan Perdata (Panmud dan Kasir) lalai dalam proses pengembalian sisa panjar Biaya Perkara	Pengembalian sisa panjar terlambat diterima oleh pihak yang berhak	Agar Panmud Perdata dan Kasir untuk kedepannya berpedoman kepada Dirjend Badilum Nomor: 613/DJU/PS.01/6/2 020

		10/Pdt.G/2024/PN Pbr, tanggal putus perkara 31 januari 2024, biaya proses terakhir pada tanggal 6 Februari 2024, namun Pengembalian Sisa Panjar pada tanggal 13 Mei 2024	2. Checklist AMPUH Pengadilan Negeri Kelas IA nomor 21 Panjar Biaya Perkara, berdasarkan Surat Dirjend Badilum Nomor: 613/DJU/PS.01/6/2020 tentang Pedoman Kepatuhan Pegembalian Sisa Panjar Biaya Perkara			
b. Kepaniteraan Pidana						
1.	Masih ditemukan perkara anak dalam putusan anonimisasi tidak tepat karena masih mencantumkan Alamat anak (Perkara Pidana Anak nomor: 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pbr) dan juga ditemukan putusan anonimisasi pengaburannya masih menggunakan tanda xxx, uji petik perkara nomor: 8/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pbr	1. Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tanggal 30 Agustus 2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan.	Hakim kurang memahami SK KMA Nomor: 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang pengaburan putusan anonimisasi	Tidak sesuai dengan SK KMA Nomor: 2-144/KMA/SK/VIII/2022	Agar Hakim tersebut mempelajari dan memahami SK KMA Nomor: 2-144/KMA/SK/VIII/2022	

	2.	Uji petik perkara Pidana nomor: 41/Pid.Sus/2024/PN Pbr 125/Pid.B/2024/PN Pbr 151/Pid.B/2024/PN Pbr Ditemukan Checklist daftar isi berkas perkara pada angka 13 (tiga belas) yaitu penetapan/perintah penahanan (Hakim/Jaksa Penuntut Umum belum ada)	1. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI Nomor 1939/DJU/SK/HM.02.3/10/2018 tanggal 8 Oktober 2018 tentang Pedoman Pemberkasan Arsip Perkara yang Telah di Minutasi pada Pengadilan Tingkat Pertama 2. Buku II administrasi Perkara edisi ke 7 (Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor :032/SK/IV/2006 tentang Memberlakukan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan.)	Panitera Muda Pidana lalai dalam Pemberkasan Arsip Perkara yang di Minutasi	Tidak tertib dalam administrasi perkara	Agar Panitera Muda Pidana memperbaiki Checklist Perkara yang diminutasi
	3.	Dalam berkas Perkara Pidana Nomor 1039/Pid.Sus/2023/PN	Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret	Petugas lalai dalam melaksanakan	Belum sesuai dengan ketentuan Surat Edaran	Agar petugas melaksanakan

		Pbr, memori dari Jaksa Penuntut Umum diterima tanggal 26 Maret 2024, sedangkan berkas perkara permohonan kasasi dikirim ke Mahkamah Agung tanggal 5 April 2024, artinya pengiriman tersebut melebihi 3 hari	2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan	pengiriman berkas perkara	Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014	sesuai aturan yang berlaku
4.	E-Doc pertimbangan hukum perkara anak belum di upload di SIPP, uji petik perkara nomor: 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pbr 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pbr 6/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pbr	1. Surat Edaran Dirjen Badilum nomor : 3/DJU/HM02.3/6/2014 tanggal 20 Juni 2014 tentang Administrasi Pengadilan berbasis Teknologi Informasi di lingkungan Peradilan Umum. 2. Surat Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 352/DJU./HM.02.2/3/2021 tanggal 20 Maret 2021 tentang Akurasi dan Pengendalian Mutu Data SIPP, angka 1 : Ketua/Wakil Ketua dan Panitera adalah	Kelalaian Panitera Pengganti untuk upload pertimbangan hukum pada SIPP	Tidak lengkapnya data yang disajikan pada SIPP	Agar Panitera Pengganti melakukan imput pertimbangan hukum tersebut	

			penanggung jawab utama dalam memastikan akurasi data, pengendalian mutu dan ketepatan waktu pengunggahan data pada aplikasi SIPP sesuai dengan Surat Edaran Dirjen Badilum nomor 3 tahun 2014 tentang Administrasi Pengadilannya Berbasis Teknologi Informasi.			
5.	Kolom tuntutan pada buku register induk belum terisi perkara No. 397/Pid.Sus/2024/PN Pbr Perkara No. 411/Pid.Sus/2024/PN Pbr dan beberapa perkara lainnya		1. Buku II SK KMA Nomor : KMA/032/SK/IV/2006 Pemberlakuan buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan 2. Buku IV tentang Tata Laksana Pengawasan. (SK KMA Nomor : KMA/080/SK/VIII/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di	Petugas tidak tertib dalam mengisi buku register	Tidak dapat diketahui terkait tuntutan pada perkara tersebut karena buku register tidak lengkap diisi	Agar petugas tertib dalam melaksanakan pengisian buku register

			Lingkungan Lembaga Peradilan).		
6.	Register penahanan belum terisi sejak bulan Januari 2024 s.d. dengan tahun berjalan	1. Buku II SK KMA Nomor : KMA/032/SK/IV/2006 Pemberlakuan buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan 2. Buku IV tentang Tata Laksana Pengawasan. (SK KMA Nomor : KMA/080/SK/VIII/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Lembaga Peradilan).	Petugas tidak tertib dalam mengisi buku register penahanan	Tidak dapat diketahui terkait tuntutan pada perkara tersebut karena buku register penahanan tidak lengkap diisi	Agar petugas tertib dalam melaksanakan pengisian buku register penahanan
7.	Register Banding pada kolom tanggal putusan dan amar putusan belum terisi uji petik pada perkara No : 1401/Pid.Sus/2023/PN Pbr No. 203/ Pid.Sus/2024/PN Pbr	1. Buku II SK KMA Nomor : KMA/032/SK/IV/2006 Pemberlakuan buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan 2. Buku IV tentang Tata Laksana Pengawasan. (SK	Petugas tidak tertib dalam mengisi buku register	Tidak dapat diketahui terkait tuntutan pada perkara tersebut karena buku register tidak lengkap diisi	Agar petugas tertib dalam melaksanakan pengisian buku register

		KMA Nomor : KMA/080/SK/VIII/200 6 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Lembaga Peradilan).			
c. Kepaniteraan Hukum					
1.	Berdasarkan penelusuran menu “Arsip Perkara” pada aplikasi SIPP Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 04 Juni 2024, terdapat perkara perdata maupun pidana yang sudah diputus dan diminutasi selama tahun 2024 edoc arsip pada menu arsip perkara kosong, begitu juga dengan tahun sebelumnya. Dokumen lengkap dari arsip berkas perkara belum dilakukan digitalisasi dengan scan/pindai dan tidak diinput dalam SIPP.	1. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor :032/SK/IV/2006 tentang Memberlakukan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan. 2. Surat Edaran Dirjen Badilum nomor : 3/DJU/HM02.3/6/2014 tanggal 20 Juni 2014 tentang Administrasi Pengadilan berbasis Teknologi Informasi di lingkungan Peradilan Umum. 3. Surat Jenderal Badan	Kurangnya pengawasan dan monitoring oleh Ketua dan Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru selaku Penanggungjawab dalam memastikan akurasi data dan pengendalian mutu pengunggahan data pada SIPP, khususnya yang berkaitan dengan Kearsipan berkas perkara.	Arsip berkas perkara banding dalam bentuk file e-doc atau arsip digital yang tersimpan pada SIPP Pengadilan Negeri Pekanbaru tidak lengkap dan akurat, sehingga Pengadilan Negeri Pekanbaru tidak memiliki backup data berkas perkara berupa data digital, baik yang tersimpan di Server SIPP maupun pada media lainnya.	1. Agar Ketua dan Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru melaksanakan pengawasan dan monitoring terhadap pengarsipan berkas perkara secara elektronik melalui transformasi digital/alih media dengan lebih maksimal dan hasil scan/pemindaian yang dilakukan dalam

					format PDF selain disimpan dalam SIPP, juga disimpan dalam folder tersendiri sesuai nomor arsip berkas perkara, yaitu dalam komputer atau harddisk selain server SIPP.
Panmud Hukum belum melakukan penyimpanan arsip berkas perkara dalam bentuk lain melalui digitalisasi (Scan/pemindaian) yang disimpan pada disket, flashdisk atau harddisk external atau media lainnya.	Peradilan Umum Nomor 414/DJU/PS.01/5/2018 tanggal 7 Mei 2018. 4. Surat Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 352/DJU./HM.02.2/3/2021 tanggal 20 Maret 2021 tentang Akurasi dan Pengendalian Mutu Data SIPP, angka 1 : Ketua/Wakil Ketua dan Panitera adalah penanggung jawab utama dalam memastikan akurasi data, pengendalian mutu dan ketepatan waktu pengunggahan data pada aplikasi SIPP sesuai dengan Surat Edaran Dirjen Badilum nomor 3 tahun 2014 tentang Administrasi Pengadilhan Berbasis Teknologi Informasi. 5. Keputusan Direktur Jenderal Badan				2. Agar Panitera Muda Hukum secara bertahap mengkoordinir Petugas Arsip untuk melakukan scan/pemindaian dan menginput file e-doc arsip berkas perkara pada SIPP, baik berkas perkara Pidana maupun Perdata yang telah diinput dan diminutasi.

			Peradilan Umum Nomor : 21/DJU/SK/OT.01.3/3/2022 tanggal 31 Maret 2022 tentang Pembaruan Standar Operasional Prosedur (SOP) Kepaniteraan pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri, Lampiran SOP Nomor : 347/DJU/OT.01.3/2022, aktivitas Petugas Arsip menginput dan scan data berkas perkara ke dalam SIPP dengan output Data arsip sudah terinput dalam SIPP, Elektronik Dokumen terinput dalam aplikasi SIPP.			
2.	Proses peminjaman berkas tidak tercatat didalam SIPP, contohnya pada perkara	Standar Sertifikasi Pengadilan Tanggung	checklist Mutu Unggul dan (AMPUH)	Kelalaian operator didalam menginput peminjaman berkas pada SIPP	Data riwayat peminjaman berkas pada SIPP kosong	Agar menginput setiap peminjaman berkas kedalam SIPP

	Nomor	Pengadilaaan Pertama badiium	Tingkat		
	86/Pid.Sus/2023/PN Pbr				
3.	Ditemukan Peminjaman berkas perkara Nomor 86/Pid.Sus/2023/PN Pbr tidak diketahui oleh Ketua Pengadilaan Negeri Pekanbaru	SOP Peminjaman dan Pengembalian Berkas Perkara Pengadilan Negeri	Kelalaiaan Petugas Arsip dan Panitera Muda Hukum	Tidak terpenuhinya Administrasi Pengarsipan Berkas Perkara	Agar setiap peminjaman disetujui dan diketahui oleh pejabat sesuai SOP yang berlaku
4.	Hasil uji petik terhadap pencarian 10 berkas perkara yaitu : 1. 48/Pdt/G/Plw/Bth/2021/PN Pbr 2. 49/Pdt/G/Plw/Bth/2022/PN Pbr 3. 50/Pdt/G/Plw/Bth/2023/PN Pbr 4. 84/Pid.B/2021/PN Pbr 5. 85/Pid.B/2022/PN Pbr 6. 86/Pid.Sus/2023/PN Pbr 7. 11/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Pbr 8. 12/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Pbr 9. 13/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Pbr	Standar checklist/Lembar Penilaian Asesmen Sertifikasi Mutu Pengadilan Unggul dan Tangguh (AMPUH) pada Pengadilan Negeri kelas IA Tahun 2024	Kelalaiaan Petugas dalam penyimpanan	Berkas sulit ditemukan	Panitera Muda Hukum agar melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penyimpanan berkas perkara

	10.21/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr				
	Ditemukan berkas perkara yang pencariannya lebih dari 5 menit yaitu : 1. 48/Pdt/G/Plw/Bth/2021/PN Pbr 86/Pid.Sus/2023/PN Pbr				
4.	Ditemukan Pelaporan perkara secara elektronik belum dilakukan Monitoring dan Evaluasi	Standar checklist/Lembar Penilaian Asesmen Mutu Sertifikasi Pengadilan Unggul dan Tangguh (AMPUH) pada Pengadilan Negeri kelas IA Tahun 2024	Kelalaian Panitera Mudah Hukum	Data yang diinput dalam pelaporan elektronik tidak dimonitoring kebenaran datanya	Agar Panitera Muda Hukum membuat laporan Monitoring dan Evaluasi terhadap pelaporan elektronik setiap bulannya
5.	Ditemukan Panitera Muda Hukum Tidak Melakukan Evaluasi Kinerja Posbakum Tiap Tahun	Standar checklist/Lembar Penilaian Asesmen Mutu Sertifikasi Pengadilan Unggul dan Tangguh (AMPUH) pada Pengadilan Negeri kelas IA Tahun 2024	Kelalaian Panitera Mudah Hukum	Tidak dapat mengukur kinerja Posbakum	Agar Panitera Muda Hukum membuat laporan evaluasi kinerja Posbakum setiap tahunnya
6.	Ditemukan Posbakum tidak memiliki buku tamu	Standar checklist/Lembar Penilaian Asesmen	Kelalaian penyelenggara	Tidak dapat mengetahui jumlah penerima layanan	Agar penyelenggara

			Sertifikasi Mutu Pengadilhan Unggul dan Tangguh (AMPUH) pada Pengadilhan Negeri kelas IA Tahun 2024	pemberian layanan hukum		Posbakum segera membuat buku tamu
7.	Uji petik perkara Pidana nomor: 41/Pid.Sus/2024/PN Pbr 125/Pid.B/2024/PN Pbr 151/Pid.B/2024/PN Pbr Ditemukan: Penjilidan tidak menggunakan Laks;	1. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI Nomor 1939/DJU/SK/ HM.02.3/10/2018 tanggal 8 Oktober 2018 tentang Pedoman Pemberkasan Arsip Perkara yang Telah di Minutasi pada Pengadilhan Tingkat Pertama 2. Buku II administrasi Perkara edisi ke 7 (Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor :032/SK/IV/2006 tentang Memberlakukan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas	Panitera Muda Hukum lalai dalam Pemberkasan Arsip Perkara	Pemberkasan Arsip Pekara belum sesuai dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI Nomor 1939/DJU/SK/ HM.02.3/10/2018	Agar Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI tersebut dilaksanakan sebagaimana mestinya	

		dan Administrasi Pengadilannya.)			
d. Kepaniteraan Perdata Khusus PHI					
1.	Perkara perdata nomor 79/Pid.Sus-PHI/2023/PN Pbr, ditemukan penjilidannya tidak dijahit dan tidak di Laks	Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI Nomor 1939/DJU/SK/HM.02.3/10/2018 tanggal 8 Oktober 2018 tentang Pedoman Pemberkasan Arsip Perkara yang Telah di Mutasi pada Tingkat Pengadil Pertama	Petugas lalai dalam melakukan Pemberkasan Arsip Perkara	Pemberkasan Arsip Perkara belum sesuai dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI Nomor 1939/DJU/SK/HM.02.3/10/2018	Agar Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI tersebut dilaksanakan sebagaimana mestinya
2.	Perkara Perdata PHI nomor 71/Ptd.Sus-PHI/2023/PN Pbr, Penjahitannya sudah benar tapi tidak di Laks	Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI Nomor 1939/DJU/SK/HM.02.3/10/2018 tanggal 8 Oktober 2018 tentang Pedoman Pemberkasan Arsip Perkara yang Telah di Mutasi pada Tingkat Pengadil Pertama	Petugas lalai dalam melakukan Pemberkasan Arsip Perkara	Pemberkasan Arsip Perkara belum sesuai dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI Nomor 1939/DJU/SK/HM.02.3/10/2018	Agar Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI tersebut dilaksanakan sebagaimana mestinya

3.	Ditemukan putusan dalam SIPP yang diinput oleh Panitera Pengganti yang seharusnya oleh Hakim berdasarkan SOP Badilum, uji petik perkara nomor: 20/Pid.Sus-PHI/2024/PN Pbr	SK Dirjen Nomor 21/DJU/SK/OT.01.3/3/2 022 tentang Pembaruan standar operasional prosedur (SOP) kepaniteraan pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri	Hakim dan Panitera Pengganti tidak mempelajari SOP yang berlaku	Pengimputan data pada SIPP tidak sesuai dengan SOP yang berlaku	Agar Hakim dan Panitera Pengganti menindaklanjutinya sesuai SOP yang berlaku
4.					
d. Kepaniteraan Pidana Khusus Tipikor					
1.	Masih ditemukan Court Calendar persidangan tidak ditandatangani oleh Penuntut Umum dan Terdakwa/ Penasehat Hukum, uji petik perkara nomor: 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pbr	1. Buku II administrasi Perkara edisi ke 7 (Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor :032/SK/IV/2006 tentang Memberlakukan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan.) 2. Surat Edaran Dirjen Badilum nomor : 3/DJU/HM02.3/6/2014 tanggal 20 Juni 2014 tentang Administrasi	Hakim dan Panitera Pengganti lalai dalam proses administrasi persidangan	Tidak terencana penyelesaian perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Agar Hakim dan Panitera Pengganti dalam setiap penyelesaian perkara untu melengkapi proses administrasi persidangan yang berlaku

		Pengadilan berbasis Teknologi Informasi di lingkungan Peradilan Umum.			
	Register penahanan pada kolom perpanjangan penahanan belum terisi contoh uji petik Perkara Tipikor No. 22/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pbr dan No. 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pbr	1. Buku II SK KMA Nomor : KMA/032/SK/IV/2006 Pemberlakuan buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan 2. Buku IV tentang Tata Laksana Pengawasan. (SK KMA Nomor : KMA/080/SK/VIII/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan di Pengawasan Lembaga Peradilan).	Petugas tidak tertib dalam mengisi buku register penahanan	Tidak dapat diketahui terkait tuntutan pada perkara tersebut karena buku register penahanan tidak lengkap diisi	Agar petugas tertib dalam melaksanakan pengisian buku register penahanan
III. ADMINISTRASI PERSIDANGAN DAN PELAKSANAAN PUTUSAN					
1.	Uji petik perkara Pidana nomor: 41/Pid.Sus/2024/PN Pbr 125/Pid.B/2024/PN Pbr 151/Pid.B/2024/PN Pbr	1. Buku II administrasi Perkara edisi ke 7 (Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor :032/SK/IV/2006	Hakim dan Panitera Pengganti lalai dalam proses administrasi persidangan	Tidak terencana penyelesaian perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku	1. Agar Hakim dan Panitera Pengganti dalam setiap penyelesaian

	Ditemukan Court Calendar tidak ditandatangani oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa/ Penasehat Hukum Terdakwa;	tentang Memberlakukan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan.) 2. Surat Edaran Dirjen Badilum nomor : 3/DJU/HM02.3/6/2014 tanggal 20 Juni 2014 tentang Administrasi Pengadilan berbasis Teknologi Informasi di lingkungan Peradilan Umum.			perkara untu melengkapi proses administrasi persidangan yang berlaku
IV. ADMINISTRASI UMUM					
a. Sub Bagian Umum dan Keuangan					
1.	Realisasi Anggaran DIPA 03 (Dirjen Badilum) per tanggal 10 Juni 2024 sebesar 31,25% yang seharusnya target Triwulan II sebesar 50%	1. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2. PMK Nomor 195/PMK.05/2018 tentang Monitoring	Uang makan tahanan belum dapat direalisasikan dikarenakan bulan sebelumnya sedang masih dilakukan secara online.	Tidak optimalnya penyerapan anggaran, sehingga dapat menurunnya nilai IKPA satker Pengadilan Negeri Pekanbaru	Agar KPA memperketat fungsi pengawasan IKPA dan segera mempercepat penyerapan akun yang bisa disegerakan.

		dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran K/L.			
		3. Peraturan Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-5/PB/2024 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga			
	2. Belum dimintakannya sewa atas ruangan Dharmayukti karini pada Pengadlan Negeri Pekanbaru	1. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 115/PMK.06/2020 Tentang Pemanfaatan Barang Milik Negara : Pasal 2 Ayat (2); Pasal 13 Ayat (1); 2. Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 2347/SEK/KU.00/10/2021 hal. Penatausahaan Pemanfaatan BMN dalam Bentuk Sewa BMN; 3. Surat Edaran	1. Kuasa Pengguna Barang Pengadlan Negeri Pekanbaru belum menerapkan surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 84/SEK/PL1.2/III/2024 tanggal 15 Maret 2024 Hal Pemberitahuan Pengenaan Biaya Sewa atas Pemanfaatan Ruangan Dharmayukti Karini;	Terdapat ketidakefektifan dalam pemanfaatan BMN berupa Ruangan Dharmayukti Karini Cabang Pengadlan Negeri Pekanbaru yang belum dikenakan biaya sewa.	1. Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Barang segera menyampaikan surat pemberitahuan terkait sewa ruangan Dharmayukti karini pada pengadlan negeri pekanbaru sesuai dengan Surat Edaran Sekretaris Mahkamah

		Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Sewa BMN di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Dibawahnya; 4. Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Sewa Barang Milik Negara Non Rumah Negara di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya.	Belum ada surat dari Dharmayukti Karini Pusat terkait tindak lanjut atas surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 84/SEK/PL1.2/III/2024 tanggal 15 Maret 2024 Hal Pemberitahuan Pengenaan Biaya Sewa atas Pemanfaatan Ruangan Dharmayukti Karini sehingga Dharmayukti Karini Daerah belum menindaklanjuti surat tersebut.		Agung RI Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Barang Milik Non Rumah Negara di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya.
3.	Ditemukan Daftar Barang Ruangan yang	PMK 181/PMK.06/2016 No.	Kurang petugas telitinya dalam	Jumlah menjadi	BMN tidak KPB memerintahkan

	belum lengkap di tandatangani penanggungjawab ruangan. (uji petik ruang Command Center, PTSP, Kepaniteraan Hukum, Ruang Hakim)	tentang Penatausahaan Barang Milik Negara.)	memperbarui dan melengkapi Daftar Barang Ruangan.	akurat untuk masing ruang kerja atau layanan yang ada	Sub Bagian Umum dan Keuangan untuk segera memperbarui dan melengkapi DBR yang tidak sesuai dan lengkap.
4.	Ditemukan tidak semua BMN yang dilabelisasi (uji petik : 2 unit AC, CPU Lenovo, Sound system ruang Command Center, 2 unit meja kerja ruang Subbag Kepegawaian dan Ortala)	PMK No. 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara.)	Kelalaian petugas dalam menginventarisir BMN	BMN tidak terinventarisasi dengan baik sehingga sulit dalam rangka penatausahaan BMN seperti pemeliharaan.	KPB memerintahkan Sub Bagian Umum dan Keuangan untuk segera melabelisasi seluruh BMN
5.	Dokumen Catatan atas Laporan Keuangan Pengadilan Negeri Pekanbaru DIPA 03 Tahun 2023 belum mengungkapkan Biaya Proses (keuangan perkara).	1. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2012 tanggal 10 April 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang	Penyusun Laporan Keuangan DIPA 03 dan Bendahara Biaya Proses tidak mengetahui adanya ketentuan tersebut, sehingga tidak terjadi adanya koordinasi antara Subbag Umum dan Keuangan dengan Kepaniteraan Perdata.	Tidak ada pengungkapan (transparansi) Pengelolaan Biaya Proses pada Laporan Keuangan	Agar Bendahara Biaya Proses mengungkapkan Pengelolaan Biaya Proses (keuangan perkara) secara berkala (semesteran atau tahunan) untuk disampaikan kepada Tim Penyusun

			berada dibawahnya, Pasal 3 ayat (2), berbunyi: "Seluruh biaya proses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola secara efektif, efisien, transparan dan dicatat dalam Catatan atas Laporan Keuangan Mahkamah Agung RI";			Laporan Keuangan, dan Tim Penyusun Laporan Keuangan agar mengungkapkan pada Laporan Keuangan periode berikutnya.
			2. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI No 1330/SEK/SK/XII/2021 tentang pedoman akuntansi berbasis akrual dan pelaporan di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya, bahwa uang titipan pihak ketiga wajib diungkap dalam CaLK (Catatan atas			

			Laporan Keuangan).		
6.	Ditemukan Pajak PPh pasal 23 untuk Penjiilidan Berkas belum dipotong dan disetor. Uji Petik : SPM GUP DIPA 03 No. 12A		1. PMK no. 59/PMK.03/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan nomor 231/PMK.03/2019 tentang Tata Cara Pendaftaran Dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, Pengukuhan Dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Serta Pemotongan Dan/Atau Pemungutan, Dan Penyetoran, Dan Pelaporan Pajak Bagi Instansi Pemerintah 3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.03/2015 Tahun 2015 tentang Jenis Jasa Lain Sebagaimana	PPK, PPSPM dan Bendahara Pengeluaran kurang memahami mengenai objek pemotongan PPh pasal 23 oleh instansi pemerintah.	Tidak terlaksananya kewajiban bendahara sebagai pemotong dan penyetor pajak yang mengakibatkan tidak terealisasinya penerimaan negara berupa pajak. Bendahara Pengeluaran agar segera memotong dan menyeter PPh pasal 23 untuk kuitansi pembayaran Penjiilidan Berkas

			Dimaksud Dalam Pasal 23 Ayat (1) Huruf C Angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008			
7.	Ditemukan Barang Milik Negara yang belum ditetapkan status penggunaannya (1 Unit Sepeda Motor dan 1 Unit Genset)	1. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah 2. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 83/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Negara	Kurangnya control pengawasan atas pemanfaatan barang milik negara pada kantor Pengadilan	Pengelolaan BMN tidak dilakukan secara baik dan pelaporannya tidak tepat waktu	Agar pengelola BMN memastikan bahwa penggunaan BMN dilakukan secara optimal dan sesuai dengan kebutuhan yang berlaku	

8.	Belum ditetapkan surat keputusan kuasa pengguna barang atas tarif sewa rumah negara yang terbaru	1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 138/PMK.06/2010 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara berupa Rumah Negara 2. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 373/KPTS/M/2001 tentang sewa rumah negara	Ketidak tahuan petugas dalam membuat tarif sewa rumah negara	PNBP menjadi tidak maksimal	Agar KPB membuat dan menetapkan tarif sewa rumah negara berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 373/KPTS/M/2001 tentang sewa rumah negara
9.	5R belum terealisasi, kabel-kabel belum tertata dengan baik dan rapi dan terdapat Layar monitoring TV belum berfungsi pada ruangan pidana	Pedoman Standar Sertifikasi Pengadilannya Unggul dan Tangguh (AMPUH) Pengadilannya Tingkat Pertama badilum AMPUH, checklist Mutu	Monev terkait pelaksanaan 5R tidak berjalan sebagaimana mestinya	Ruangan menjadi tidak rapi dan perangkat yang ada tidak termanfaatkan dengan baik	Agar kabel-kabel dapat dirapikan dan ditata dengan baik, Layar Monitoring TV dimanfaatkan untuk menampilkan data dan informasi terkait bagian masing-masing bagian

b. Sub Bagian Kepegawaian & Ortala					
1.	Ditemukan absensi Hakim/Pegawai Pengadilan Negeri Pekanbaru pada aplikasi SIKEP berbeda dengan absensi manual. (absensi pada aplikasi SIKEP dilakukan setelah masuk jam kantor, namun absensi manualnya tercatat sebelum masuk jam kantor).	1. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 368/KMA/SK/XII/2022 Tahun 2022 Pedoman Presensi Online untuk Hakim dan Aparatur Sipil Negara pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya Melalui Aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian 2. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penegakan Disiplin Kerja Hakim pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada Dibawahnya 3. Maklumat Ketua Mahkamah Agung Nomor 01/Maklumat/KMA/IX/2017 tentang Pengawasan dan Pembinaan Hakim,	Hakim/Pegawai lalai dalam melakukan absensi pada Aplikasi SIKEP dan absensi manual.	Catatan kehadiran pada aplikasi absensi SIKEP dan aplikasi absensi Komdanas (untuk penggajian/keuangan) berbeda, sehingga apabila terjadi pemeriksaan oleh BPK (Badan Pemeriksa Keuangan), maka dikhawatirkan akan terjadi pengembalian keuangan terhadap Hakim/Pegawai terkait.	Agar Pimpinan Pengadilan Negeri Pekanbaru mengingatkan kembali kepada seluruh Hakim/Pegawai agar melakukan absensi baik secara manual maupun pada aplikasi SIKEP sesuai dengan ketentuan yang berlaku

			Aparatur Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya			
c. Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan						
1.	Konten website ada yang belum update terkait dengan SOP khususnya terkait SOP Kepaniteraan dan belum terlihat menu laporan layanan informasi publik	1. Surat Keputusan Direktur Badan Umum Agung RI Nomor 1364/DJU/SK/HM.02. 3/5/2021 2. Surat Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/202 2 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan 3. Surat Keputusan Dirjen Badilum No. 21/DJU/SK/OT.01.3/ 3/2022 tentang Pembaruan SOP Kepaniteraan Pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri	Tim pengelola website tidak mengupdate / memuat informasi dan laporan secara berkala pada website	Tidak lengkap dan update tampilan website Pengadilan Negeri Pekanbaru sebagaimana standarisasi website Pengadilan di lingkungan Peradilan Umum	Petugas website agar memasukkan informasi yang wajib disediakan dan laporan secara berkala dalam website Pengadilan Negeri Pekanbaru sebagaimana standarisasi website pengadilan di lingkungan peradilan umum	

	Anomali capaian kinerja pada indikator Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi yakni 689%.	Keputusan Mahkamah Republik Indonesia Nomor: 2049/Sek/Sk /X li/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Di Lingkungan Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya	Dalam penyusunan target capaian kinerja belum dihitung secara maksimal	GAP antara target dan Capaian kinerja indikator terlalu jauh / besar sehingga pengukuran tidak bisa dianalisa	agar PN Pekanbaru melakukan reviu target pada indikator Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi tersebut
B. KINERJA PELAYANAN PUBLIK					
1.	Pengunjung belum tercatat pada buku tamu elektronik PTSP+, masih menggunakan buku tamu manual	Keputusan Jenderal Peradilan Mahkamah Republik Indonesia Nomor 114/DJU/SK.HM1.1.1//2 024 tentang Pembaruan Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri, huruf F angka 1, huruf F angka 2 huruf f	Petugas belum mengetahui prosedur pelayanan PTSP untuk pencatatan tamu	Pengunjung tidak tercatat pada buku tamu elektronik PTSP+	Agar petugas mencatatkan pengunjung pengadilan pada buku tamu elektronik PTSP+
2.	PPID Pengadilan Negeri Pekanbaru belum	Lampiran 1. Surat Keputusan	Kurang memahami	Permasalahan yang dihadapi oleh	Agar PPID secara berkala

	melaksanakan rapat koordinasi dan rapat kerja secara berkala bersama dengan PPID Pelaksana dan Petugas Informasi tentang pelayanan informasi public	Mahkamah Agung RI Nomor 144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan, Poin V, Huruf G, angka 6	tentang tugas dan tanggungjawab sebagai PPID	Petugas Informasi tidak terselesaikan dengan baik	melaksanakan rapat koordinasi dengan PPID Pelaksana dan Petugas Informasi untuk membahas permasalahan tentang layanan informasi publik termasuk biaya perolehan informasi publik
3.	PPID belum menetapkan SOP tentang: 1.Pengumuman Informasi. 2.Pengelolaan permohonan informasi. 3.Pengelolaan keberatan atas informasi. 4.Penanganan sengketa Informasi Publik oleh Atasan PPID. 5.Pengujian tentang konsekuensi. 6.Penetapan dan Pemutakhiran DIP.	Lampiran I. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan, Poin V, Huruf F, angka 12. Tugas, Tanggung jawab dan kewenangan Atasan PPID antara lain menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) baik secara manual maupun secara elektro	Atasan PPID tidak mengetahui tentang tugas pembuatan SOP sebagaimana Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 2-144//KMA/SK/VIII/2022 tanggal 30 Agustus 2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan	Petugas layanan informasi tidak mengetahui secara jelas tentang tugas dan jenis layanan, SOP Layanan Informasi yang berakibat pada tidak maksimalnya layanan informasi kepada masyarakat	Agar Atasan PPID membuat Standar Operasional Prosedur (SOP) baik secara manual maupun secara elektronik tentang: Pengumuman Informasi. Pengelolaan permohonan informasi. Pengelolaan keberatan atas informasi. Penanganan

			pintu (ptsp) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri		
5.	PPID Pengadilan Negeri belum Laporan Informasi Publik tahun 2023 dan mengirim Sekretaris Mahkamah Agung setiap tahun sebagaimana format dalam lampiran SK KMA nomor :2-144/KMA/SK/VIII/2022	Lampiran I. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan, Poin XV., Huruf A, angka 2: PPID wajib menyampaikan laporan layanan informasi kepada Sekretaris Mahkamah Agung untuk dikompilasi dan hasilnya disampaikan kepada Komisi Informasi paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun pelaksanaan anggaran berakhir	PPID tidak mengetahui kewajiban pembuatan Laporan Layanan Informasi yang dikirim kepada Sekretaris MA setiap tahun	Mahkamah Agung tidak mendapatkan data yang akurat dari laporan layanan informasi publik di Pengadilan Negeri Tembilahan yang berpengaruh pada laporan Mahkamah Agung kepada Komisi Informasi Pusat dan tidak ada komitmen layanan informasi publik kepada masyarakat	Agar PPID segera membuat laporan layanan informasi tahun 2023 mengirim kepada Sekretaris Mahkamah Agung

BAB III

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. KESIMPULAN

Bahwa dari hasil pemeriksaan terhadap bidang-bidang sebagaimana diuraikan tersebut di atas ditemukan bahwa tugas dan fungsi Pengadilan Negeri Pekanbaru secara umum sudah berjalan dengan baik, namun terdapat hal-hal yang perlu diperbaiki dan disempurnakan sebagaimana yang telah dijabarkan didalam Bab II.

B. REKOMENDASI

Berdasarkan temuan-temuan pada Bab II tersebut di atas, Tim Pengawas Pengadilan Tinggi Riau juga telah memberikan rekomendasi.

Diminta kepada Pimpinan Pengadilan Negeri Pekanbaru beserta jajarannya untuk menindaklanjuti temuan-temuan dari Tim Pengawas Pengadilan Tinggi Riau tersebut dalam waktu 1 (satu) bulan mulai tanggal 12 Juni 2024 s.d. 12 Juli 2024, dan segera melaporkan hasil tindak lanjutnya ke Pengadilan Tinggi Riau. Tim pengawasan Pengadilan Tinggi Riau juga memberikan masukan kepada Pengadilan Negeri Pekanbaru agar dapat mengusulkan permohonan e-register penuh atau tahap ke 2 dengan mempedomani Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 120/DJU/ HM02.3/1/2023 tentang Persyaratan Pelaksanaan Register Elektronik Tahap II Bagi Pengadilan Negeri dan juga Tim memberikan masukan untuk arsip, agar menghindari penumpukan arsip perkara karena ruangan yang terbatas, perkara yang sudah 30 tahun bisa diarsipkan pada dinas perpustakaan dan arsip daerah dengan menjalin kerjasama penandatanganan MoU terkait penitipan arsip perkara.

Demikianlah laporan ini dibuat dan ditandatangani oleh Tim Pengawas Pengadilan Tinggi Riau sebagai bahan dan evaluasi kinerja serta monitoring atas tindak lanjutnya.

Rengat, 11 Juni 2024

Tim Pengawas



1. Ketua Tim
Nelson Samosir, S.H., M.H.

2. Anggota
Noer Ali, S.H.

3. Anggota
Hendri , S.H., M.H.

4. Anggota
Tantowi Jauhari, S.H., M.H.

5. Anggota
M. Jamalis, S.H.

6. Anggota
Roby Hidayat, S.T.

7. Anggota
Amirin, S.H.

8. Anggota
Sesiliya Rahayu, S.E.

9. Anggota
Fadhliamin, S.Sl.

10. Anggota
Rommy Saputra, S.E.

11. Anggota
Adetia Pratama, A.Md.

12. Sekretaris
Yudhi Darmawan, S.E.

The right side of the page contains handwritten signatures corresponding to the list on the left. The signatures are written on a background of horizontal dotted lines. The first signature is a dense, scribbled mark. The subsequent signatures are more legible, though still stylized. The signature for the secretary (Yudhi Darmawan) is written at the bottom of the list.

LAMPIRAN



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI RIAU

Jalan Jenderal Sudirman No. 315, Kel. Cinta Raja, Kec. Sail, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau 28131
www.pt-riau.go.id, admin@pt-riau.go.id

SURAT TUGAS

Nomor: 739/KPT.W4-U/ST.KP7.1/V/2024

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka akan dilaksanakan Pengawasan dan Pendampingan Asesmen sertifikasi Mutu Peradilan Unggul dan tangguh (AMPUH) di Pengadilan Negeri Pekanbaru;
- b. bahwa untuk menindaklanjuti perihal tersebut dipandang perlu menunjuk nama yang tersebut di bawah ini;
- Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung RI;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
4. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum;
5. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/080/SK/VIII/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan Di Lingkungan Lembaga Peradilan;
6. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI Nomor: 142/DJU/SK.OT1.6/II/2024 Tentang Pemberlakuan Program Sertifikasi Mutu Peradilan Unggul dan Tangguh (AMPUH);
7. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Riau Nomor: 596/KPT.W 4.U/SK.PW 1.1.1/IV/2024 Tentang Penunjukan Tim Pengawasan Dan Asesmen Asesmen sertifikasi Mutu Peradilan Unggul dan tangguh (AMPUH) pada Pengadilan Negeri Sewilayah Hukum Pengadilan Tinggi Riau;
8. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pengadilan Tinggi Riau Tahun 2024 Nomor: 005.01.2.400493/2024 tanggal 24 November 2023.

MENUGASKAN:

Kepada :

No.	Nama/ NIP	Gol.	Jabatan
1	NELSON SAMOSIR, S.H., M.H. NIP. 195801251985031002	IV/e	Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Riau (Hakim Tinggi Pengawas Daerah)
2	NOER ALI, S.H. NIP. 196009081986121001	IV/e	Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Riau (Hakim Tinggi Pengawas Daerah)
3	HENDRI, S.H., M.H. NIP. -	-	Hakim Ad Hoc Tipikor Pengadilan Tinggi Riau (Hakim Tinggi Pengawas Daerah)
4.	TANTOWI JAUHARI, S.H., M.H. NIP. -	-	Hakim Ad Hoc Tipikor Pengadilan Tinggi Riau (Hakim Tinggi Asesor)
5.	M. JAMALIS, S.H. NIP. 196312231983031003	IV/a	Panitera Muda Pidana Pengadilan Tinggi Riau
6.	ROBY HIDAYAT, S.T. NIP. 198412042009041005	IV/a	Kepala Bagian Umum dan Keuangan Pengadilan Tinggi Riau



7.	AMIRIN, S.H. NIP. 196304041985031010	III/d	Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Riau
8.	SESILIYA RAHAYU, S.E. NIP. 198509292009122005	III/d	Pranata Keuangan APBN Penyelia Pengadilan Tinggi Riau
9.	FADHLIAMIN, S.SI. NIP. 199102062015031003	III/b	Pranata Komputer Ahli Pertama Pengadilan Tinggi Riau
10.	ROMMY SAPUTRA, S.E. NIP. 198508182019031002	III/b	Operator-Penata Layanan Operasional Pengadilan Tinggi Riau
11.	PERMAIZAL NIP. 197404132003121002	III/b	Klerek - Pengadministrasi Perkantoran Pengadilan Tinggi Riau
12.	ADETIA PRATAMA, A.Md. NIP. 199207112019031006	II/d	Operator - Teknisi Sarana dan Prasarana Pengadilan Tinggi Riau
13.	YUDHI DARMAWAN, S.E. NIP.	IX	PPPK- Perencana Ahli Pertama

Demikian surat tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

- Untuk : 1. Melakukan Pengawasan dan Pendampingan Asesmen sertifikasi Mutu Peradilan Unggul dan tangguh (AMPUH) di Pengadilan Negeri Pekanbaru;
2. Selama mengikuti kegiatan tersebut yang bersangkutan dibebaskan dari tugasnya sehari-hari;
3. Jangka waktu pelaksanaan kegiatan selama 2 (dua) hari terhitung mulai tanggal 10 s.d 11 Juni 2024 di Pengadilan Negeri Pekanbaru, Jalan Teratai No. 85 Sukajadi, Kota Pekanbaru;
4. Segala biaya transportasi dan akomodasi sebagai akibat pelaksanaan tugas tersebut dibebankan sepenuhnya kepada DIPA Pengadilan Tinggi Riau Tahun 2024.

Pekanbaru, 22 Mei 2024



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :
Ketua Pengadilan Tinggi Riau



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dr. H. Siswandriyono, S.H., M.Hum.
NIP. 195906021985121001

Tembusan :

1. Yth. Plt. Sekretaris Mahkamah Agung RI di Jakarta;
2. Yth. Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI di Jakarta;
3. Arsip.

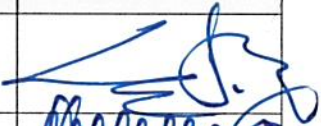
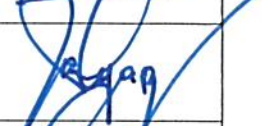
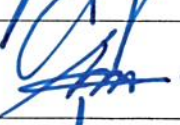
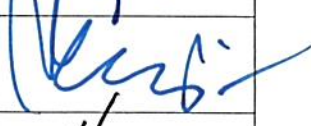


	PENGADILAN TINGGI RIAU Tim sertifikAsi Mutu Pengadilan Unggul dan tangguH (AMPUH)	Nomor	A.F.11.2024	
		Revisi	-	
	DAFTAR HADIR PERTEMUAN PEMBUKAAN PELAKSANAAN AMPUH	Tanggal	13 Februari 2024	
	Jl. Jenderal Sudirman No.315 Wonorejo Marpoyan Damai, Cinta Raja, Kec. Sail, Kota Pekanbaru, Riau 28126	Halaman	1 of 6	

DAFTAR HADIR PERTEMUAN PEMBUKAAN

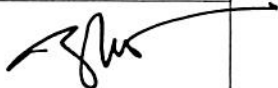
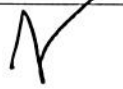
Satuan Kerja : Pengadilan Negeri Pekanbaru

Tanggal : 10 Juni 2024

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Nelson Fauzir	HT.	
2	Nur Ali	HT	
3	Tanto Wi Juhari	HAT	
4	Haris	HAT	
5	Roby Hidayat	Kabag Umum Keuangan	
6	M. Jamalis	Panmud Pidana PT Riau	
7	Amirul	Pan Penggatis PT Riau	
8	Sesiliya Rahayu	Panata Kau APBH PT Riau	
9	Astria Prantama	Staf PT. Riau.	
10	Fadhlurrahman	pan pt riau	
11	MARHUM EFFENDI	KPN	
12	MARHUM K	Wk pan	

(*) Keterangan: Coret/ Hapus yang tidak sesuai.

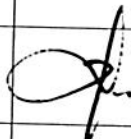
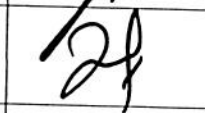
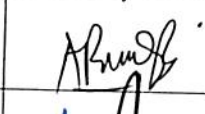
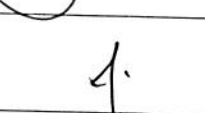
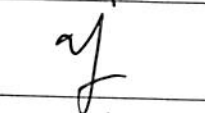
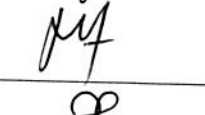
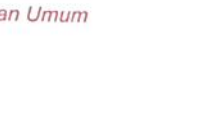
	PENGADILAN TINGGI RIAU Tim sertifikAsi Mutu Pengadilan Unggul dan tangguH (AMPUH)	Nomor	A.F.11.2024	
		Revisi	-	
	DAFTAR HADIR PERTEMUAN PEMBUKAAN PELAKSANAAN AMPUH Jl. Jenderal Sudirman No.315 Wonorejo Marpoyan Damai, Cinta Raja, Kec. Sail, Kota Pekanbaru, Riau 28126	Tanggal	13 Februari 2024	
		Halaman	2 of 6	

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
13.	DANIEL PERALLO	Hakim	
14	Erry Marlianto	Sekretaris	
15	ARSYAWAL	Hakim	
16	Yuliazmen	Hakim	
17	Abdul HARI'S	Hakim	
18	SUGENG HARSOYO	Hakim	
19	ITE - Firat	Hakim	
20	Januar Anadi	Hakim Tipikal	
21	Yuli Artha P.	Hakim	
22	Roni Suantra	Hakim	
23	Donson Panoncu	Hakim	
24	Jimmy Manli	Hakim	
25	Indra Lk.	Hakim	
26	Dedy	Hakim	

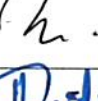
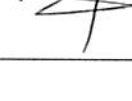
	PENGADILAN TINGGI RIAU Tim sertifikasi Mutu Pengadilan Unggul dan tangguh (AMPUH)		Nomor	A.F.11.2024	
	DAFTAR HADIR PERTEMUAN PEMBUKAAN PELAKSANAAN AMPUH		Revisi	-	
	Jl. Jenderal Sudirman No.315 Wonorejo Marpoyan Damai, Cinta Raja, Kec. Sail, Kota Pekanbaru, Riau 28126		Tanggal	13 Februari 2024	
			Halaman	3 of 6	

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
27	FITRIZAL YANTO	Hakim	
28	Mario Samando B	Analisis Perkara Pengadilan	
29	XUGGA PUTRA N	KS	
30	Dedy Ties Yanto	Penuntut Pidana	
31	Marlinen GRESLY SH	Panitera Pengganti	
32	Pang I	Staf PT Rona	
33	Yudhi D	Staf PT Rina	
34	Septa Putra Sembiring	Penuntut Hukum PN. Rona	
35	ZETRI M.H,	Hakim	
36	Pinaldo	PNS	
36	Uhsan M.	Staf/Calon	
37	Henti Rugga	JS	
38	Adrian Saherman	P. P.	
39	Roni Anugrah	Calon	

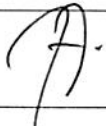
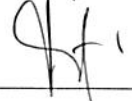
	PENGADILAN TINGGI RIAU	Nomor	A.F.11.2024	
	Tim sertifikAsi Mutu Pengadilan Unggul dan tangguh (AMPUH)	Revisi	-	
	DAFTAR HADIR PERTEMUAN PEMBUKAAN PELAKSANAAN AMPUH	Tanggal	13 Februari 2024	
	Jl. Jenderal Sudirman No.315 Wonorejo Marpoyan Damai, Cinta Raja, Kec. Sail, Kota Pekanbaru, Riau 28126	Halaman	4 of 6	

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
40	BAKRY	JS	
41	KURFITRIA	PP	
42	Hanny M	JS	
43	Wahyuni	PP	
44	Arnoldus S	Pengelola Data	
45	AUCIA P. HIDAYAT	CACIM	
46	Mahmud Effendi	KPN	
47	Dewi Musfela	Kasub Sag PTP	
48	Yuni etysober	Kanu uk	
49	Rustan Binaga	Hakim Ratoc Pri	
50	TEL...	Hakim Ratoc Pri	
51	Wum Yuliana	PP	
52	Mura Sari	PP	
53	Atu Trisna	PP	

	PENGADILAN TINGGI RIAU Tim sertifikAsi Mutu Pengadilan Unggul dan tangguH (AMPUH)		Nomor	A.F.11.2024	
	DAFTAR HADIR PERTEMUAN PEMBUKAAN PELAKSANAAN AMPUH		Revisi	-	
	Jl. Jenderal Sudirman No.315 Wonorejo Marpoyan Damai, Cinta Raja, Kec. Sail, Kota Pekanbaru, Riau 28126		Tanggal	13 Februari 2024	
			Halaman	5 of 6	

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
54	SURYANI AFAN	PP	
55	IRENE WILMORI	PP	
56	Mella Iva. R	JS	
57	LuGiane	PKAPBN	
58	Mini S. Hutagaol	PPABP	
59	Nurlismawati	PP	
60	Idomo Ginting	Hakim -	
61	Lifian Tazgy	Hakim	
62	Hendak	Hakim	
63	Fah Zenti	Panul Tapikur	
64	Gunani	Brut hpuen	
65	prima Ardham	panmud PHI	
66	Asmatani	JS	
67	Cantopra Nanggotan	filan	

	PENGADILAN TINGGI RIAU	Nomor	A.F.11.2024	
	Tim sertifikAsi Mutu Pengadilan Unggul dan tangguH (AMPUH)	Revisi	-	
	DAFTAR HADIR PERTEMUAN PEMBUKAAN PELAKSANAAN AMPUH	Tanggal	13 Februari 2024	
	Jl. Jenderal Sudirman No.315 Wonorejo Marpoyan Damai, Cinta Raja, Kec. Sail, Kota Pekanbaru, Riau 28126	Halaman	6 of 6	

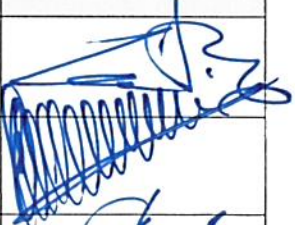
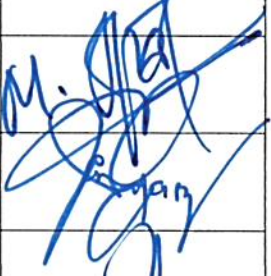
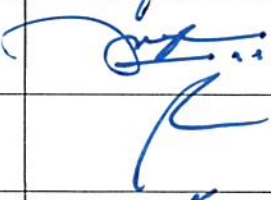
NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
68	Agnes Olivia	staf pidana	
69	Senwan	PP	
70	M.G- Simarmata	JS	
71	Lilis Triana	JS	
72	Heni Hatina M	Staff	
73	Tudha Syahin P	Staff UP	

	PENGADILAN TINGGI RIAU	Nomor	A.F.12.2024	
	Tim sertifikasi Mutu Pengadilan Unggul dan tangguh (AMPUH)	Revisi	-	
	DAFTAR HADIR PERTEMUAN PENUTUPAN PELAKSANAAN AMPUH	Tanggal	13 Februari 2024	
	Jl. Jenderal Sudirman No.315 Wonorejo Marpoyan Damai, Cinta Raja, Kec. Sail, Kota Pekanbaru, Riau 28126	Halaman	1 of 6	

DAFTAR HADIR PERTEMUAN PENUTUPAN

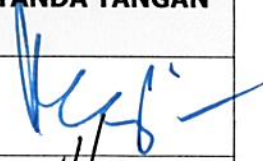
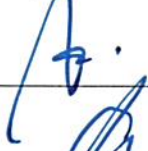
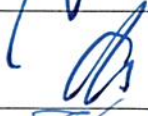
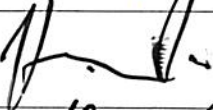
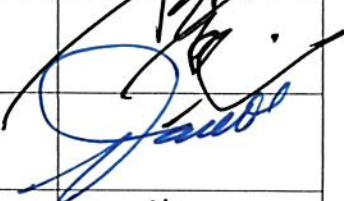
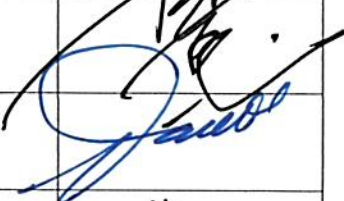
Satuan Kerja : Pengadilan Negeri Pekanbaru

Tanggal : 11 Juni 2024

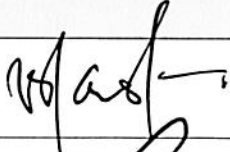
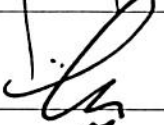
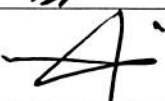
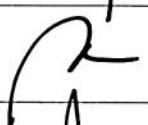
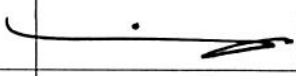
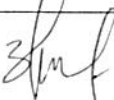
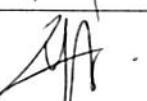
NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Nelson Jansari	HT	
2	Nau Ali	HT	
3	Tanrowi Jansari	JHS	
4	Helen	CTAT	
5	M. Jamalis	Panjud Puluau	
6	Lesiliya Rahayu	PK APBN Pengelola PT Riau	
7	Roby Hidayat	Kabes Luman Kawangan	
8	Fa Shw ann	prokan	
9	Yudhi Darmawan	RPA	
10	Aleirai	PP PT	
11	Rony	Atas PT	
12	Adelia P.	staf PT Riau	

(*) Keterangan: Coret/ Hapus yang tidak sesuai.

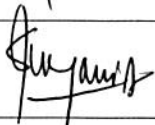
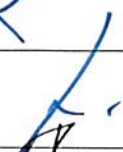
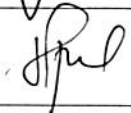
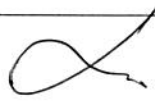
	PENGADILAN TINGGI RIAU	Nomor	A.F.12.2024	
	Tim sertifikasi Mutu Pengadilan Unggul dan tangguh (AMPUH)	Revisi	-	
	DAFTAR HADIR PERTEMUAN PENUTUPAN PELAKSANAAN AMPUH	Tanggal	13 Februari 2024	
	Jl. Jenderal Sudirman No.315 Wonorejo Marpoyan Damai, Cinta Raja, Kec. Sail, Kota Pekanbaru, Riau 28126	Halaman	2 of 6	

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
13	Indrum Effendi	KPN	
14	Moro Sin	WKN	
15	Ery Marchianto	Sekretan?	
16	ARSYAWAL	HAKIM	
17	Adrian Hutagaol	HAKIM	
18	Abdul Hakim	HAKIM	
19	H.E. Rivut	HAKIM	
20	S. Harsono	HAKIM	
21	Indra Lk.	HAKIM	
22	Roni Suantra	HAKIM	
23	Juharsen	HAKIM	
24	ANGGIA PUTRA.N	Is	
25	Rody Tia Dianto	Panual Pstaka	
26	Robt Anugrah	Calon Hakim	

	PENGADILAN TINGGI RIAU Tim sertifikasi Mutu Pengadilan Unggul dan tangguh (AMPUH)		Nomor	A.F.12.2024	
	DAFTAR HADIR PERTEMUAN PENUTUPAN PELAKSANAAN AMPUH		Revisi	-	
	Jl. Jenderal Sudirman No.315 Wonorejo Marpoyan Damai, Cinta Raja, Kec. Sail, Kota Pekanbaru, Riau 28126		Tanggal	13 Februari 2024	
			Halaman	3 of 6	

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
27	Rivaldo Setiawan	Calon Hakim.	
28	Ihsan Alhamami	APP / Calon Hakim	
29	Mario Setiawan Butar	analis proses pengadilan	
30	Ampro Ningsdam	— —	
31	Fitrada Yono	Hakim	
32	AUCIA R. HIDAYAT	CAKIM	
33	Arnoldus Simarmata	Pengelola Data	
34	Taruddin	JSP	
35	Sapta Putra Sembiring	Panmud Hutan pro. Pekanbaru	
36	Anelita Fitri	APP	
37	KENNIA C.	APP	
38	Auni S. H-Gun	Aspiran	
39	Ayu Muthia Firdaus	Calon Hakim	
40	Amalia Khoirunnisa	Calon Hakim	

	PENGADILAN TINGGI RIAU Tim sertifikAsi Mutu Pengadilan Unggul dan tangguH (AMPUH)		Nomor	A.F.12.2024	
	DAFTAR HADIR PERTEMUAN PENUTUPAN PELAKSANAAN AMPUH		Revisi	-	
	Jl. Jenderal Sudirman No.315 Wonorejo Marpoyan Damai, Cinta Raja, Kec. Sail, Kota Pekanbaru, Riau 28126		Tanggal	13 Februari 2024	
			Halaman	4 of 6	

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
41	DWI MORRELA	Cakim	
42	IRENE WISMERI	PP	
43	Ayu Trisna	PP	
44	SURYANI AFON	PP	
45	Andreane Hutagaol	Cakim	
46	Salomo Guntung	Hakim	
47	DAWI Purnama	Hakim	
48	Jati Zambri	Pan. d. Tingkat	
49	Mella Ivana	rs	
50	Feni elysebet	Kasab. Uk	
51	Liana	Eksekusi	
52	Dani Wotika Gidoh	lemb. Gzy PTIP	
53	SOLMAN	plhpantern	



Nomor	A.F.12.2024
Revisi	-
Tanggal	13 Februari 2024
Halaman	5 of 6

[illegible]

	PENGADILAN TINGGI RIAU Tim sertifikAsi Mutu Pengadilan Unggul dan tangguH (AMPUH)	Nomor	A.F.12.2024	
	DAFTAR HADIR PERTEMUAN PENUTUPAN PELAKSANAAN AMPUH Jl. Jenderal Sudirman No.315 Wonorejo Marpoyan Damai, Cinta Raja, Kec. Sail, Kota Pekanbaru, Riau 28126	Revisi	-	
		Tanggal	13 Februari 2024	
		Halaman	6 of 6	

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN

KONTRAK KERJA

Yang bertanda tangan di bawah ini saya :

Nama : MASHURI EFFENDIE, S.H., M.H.

NIP : 197305251999031004

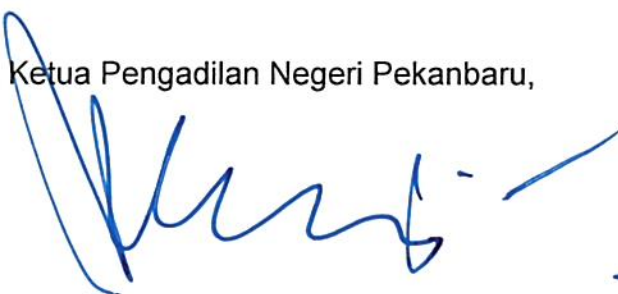
Jabatan : KETUA PENGADILAN NEGERI PEKANBARU

Instansi : PENGADILAN NEGERI PEKANBARU

Sehubungan dengan Satuan Kerja Pengadilan Negeri Pekanbaru telah dilakukan pengawasan oleh Tim Pengawas dan Pendampingan Asesmen AMPUH Pengadilan Tinggi Riau dalam rangka pengawasan dan Pendampingan Asesmen AMPUH, berdasarkan surat tugas Nomor : 739/KPT.W4-U/ST.KP7.1/V/2024 tanggal 22 Mei 2024, melakukan pengawasan dan Asesmen AMPUH pada Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 10 s.d. 11 Juni 2024, dari hasil pengawasan pada Manajemen Peradilan/ Administrasi perkara / Administrasi persidangan yang terdiri dari Administrasi/ persidangan perkara perdata, Administrasi / persidangan perkara pidana, pelayanan publik/ kinerja pelayanan publik, dan administrasi umum serta pendampingan Asesmen AMPUH. Terdapat temuan-temuan sebagaimana tersebut dalam Laporan Hasil Pengawasan (LHP) (terlampir) yang harus diperbaiki untuk ditindaklanjuti oleh Pimpinan Pengadilan Negeri Pekanbaru dengan seluruh jajarannya. Maka Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru bersedia akan melakukan perbaikan untuk menindaklanjuti temuan Tim Pengawas dan Pendampingan Asesmen AMPUH tersebut dengan kesepakatan waktu selama 1 (satu) Bulan atau 30 hari kalender sejak tanggal 12 Juni 2024 sampai dengan tanggal 12 Juli 2024 untuk hasil pendampingan asesmen AMPUH dilengkapi data dukung/evidence paling lambat sebelum Asesmen oleh Asesor Badilum turun ke Pengadilan Negeri Pekanbaru dan untuk tindaklanjut hasil pengawasan akan melaporkan hasil penyelesaian tindak lanjut temuan tersebut kepada Ketua Pengadilan Tinggi Riau.

Demikian kontrak kerja ini dibuat dengan sebenarnya yang kemudian ditandatangani oleh yang dikenai kontrak kerja, Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru dan Tim Pengawas Pengadilan Tinggi Riau.

Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru,



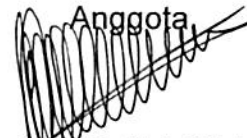
MASHURI EFFENDIE, S.H., M.H.

Pekanbaru, 11 Juni 2024

Ketua Tim Pengawas,



NELSON SAMOSIR, S.H., M.H.

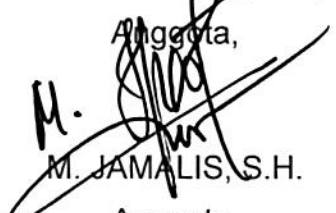
Anggota,

NOER ALI, S.H.

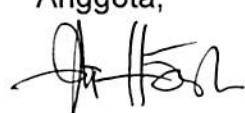
Anggota,

HENDRI, S.H., M.H.

Anggota,

TANTOWI JAUHARI, S.H., M.H.

Anggota,

M. JAMALIS, S.H.

Anggota,

ROBY HIDAYAT, S.T.

Anggota,

AMIRIN, S.H.

Anggota,

SESILIYA RAHAYU, S.E.

Anggota,

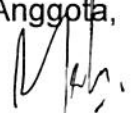
FADHLIAMIN, S.SI.

Anggota,

ROMMY SAPUTRA, S.E.

Anggota,

ADETIA PRATAMA, A.Md.

Anggota,

YUDHI DARMAWAN, S.E.



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI RIAU

Jalan Jenderal Sudirman No. 315, Kel. Cinta Raja, Kec. Sail, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau 28131
www.pt-riau.go.id, admin@pt-riau.go.id

BERITA ACARA SERAH TERIMA LAPORAN HASIL PENGAWASAN (LHP)

Pada hari ini, **Selasa** tanggal **Sebelas** bulan **Juni** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat** yang bertanda tangan dibawah ini :

- 1) **Nelson Samosir, S.H., M.H.** sebagai **Ketua Tim Pengawasan**, dalam kesepakatan ini mewakili dan bertindak atas nama Tim Pengawasan Pengadilan Tinggi Riau pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, beralamat di Jalan Sudirman No.315 Pekanbaru, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**
- 2) **Mashuri Effendie, S.H., M.H.** sebagai **Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru**, dalam kesepakatan ini mewakili dan bertindak atas nama **Pengadilan Negeri Pekanbaru**, beralamat di Jl. Teratai No.256, Sukajadi - Pekanbaru sebagai **PIHAK KEDUA**;

Berdasarkan Surat Tugas Ketua Pengadilan Tinggi Riau Nomor: 739/KPT.W4-U/ST.KP7.1/V/2024 tanggal 22 Mei 2024, **PIHAK PERTAMA** telah selesai melaksanakan tugas dalam rangka Pengawasan dan Pendampingan Asesmen sertifikasi Mutu Peradilan Unggul dan tangguh (AMPUH) di Pengadilan Negeri Pekanbaru dan menyerahkan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) kepada **PIHAK KEDUA** untuk dapat ditindaklanjuti sesuai dengan waktu yang telah di tentukan.

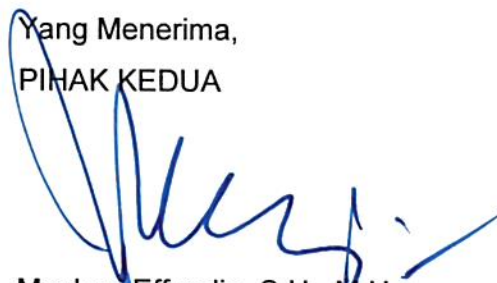
Demikian Berita Acara Serah Terima Laporan Hasil Pengawasan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang Menyerahkan,
PIHAK PERTAMA



Nelson Samosir, S.H., M.H.

Yang Menerima,
PIHAK KEDUA



Mashuri Effendie, S.H., M.H.

BERITA ACARA PEMERIKSAAN KAS

Pada hari ini **SENIN tanggal 10 Juni 2024**, Berdasarkan Surat Tugas Ketua Pengadilan Tinggi Riau Nomor 739/KPT.W4-U/ST.KP7.1/V/2024 tanggal 22 Mei 2024 telah dilakukan Pengawasan (Pemeriksaan) terhadap Buku Peuangan Perkara dan atas Perintah Tim Pengawas buku tersebut ditutup dengan keadaan sebagai berikut :

Menurut Buku per 10 Juni 2024 :

I	Buku Induk Keuangan Perkara Perdata		
a	Saldo bulan Mei 2024	Rp 1.235.494.583,00	
b	Penerimaan per 10 Juni 2024	Rp 24.089.000,00	
c	Pengeluaran 10 Juni 2024	Rp 13.600.500,00	
	Jumlah I		Rp1.245.983.083.00
II	Buku Keuangan Konsinyasi		
a	Saldo bulan Mei 2024	Rp 13.275.984.052.00	
b	Penerimaan 10 Juni 2024	Rp 100.000.000.00	
c	Pengeluaran 10 Juni 2024	Rp 62.830.000.00	
	Jumlah II		Rp13.313.154.052.00
III	Buku Keuangan Biaya Eksekusi		
a	Saldo bulan per Mei 2024	Rp 1.714.418.499,00	
b	Penerimaan 10 Juni 2024	Rp 11.360.000.00	
c	Pengeluaran 10 Juni 2024	Rp 10.368.000.00	
	Jumlah III		Rp 1.715.410.499.00
IV	Buku Keuangan Perkara PHI		
a	Saldo bulan Mei 2024	Rp 214.604.790.00	
b	Penerimaan 10 Juni 2024	Rp 3.700.000.00	
c	Pengeluaran 10 Juni 2024	Rp 638.000.00	
	Jumlah IV		Rp 217.666.790.00
V	Buku Keuangan Barang Bukti		
a	Saldo bulan per Mei 2024	Rp5,000,000.00	
b	Penerimaan 10 Juni 2024	Rp0.00	
c	Pengeluaran 10 Juni 2024	Rp0.00	
	Jumlah V		Rp5,000,000.00
VI	Buku Keuangan Pidana/Penangguhan Pehanahan		
a	Saldo bulan Mei 2024	Rp0.00	
b	Penerimaan 10 Juni 2024	Rp0.00	
c	Pengeluaran 10 Juni 2024	Rp0.00	
	Jumlah VI		Rp0.00
	Jumlah I +II+III+IV+V+VI		Rp 16.497.214.424.00

Menurut Kas

1 Uang Tunai Biaya Perkara	Rp 3.539.807.00
2 Saldo rekening Bank	Rp 16.517.302.117.00
3 Materai	-
4 Saldo Kas	Rp 16.520.841.924.00
Selisih (Saldo Pembukuan-Saldo Kas)	Rp -23.627.500.00

Penjelasan

Termasuk didalam saldo bank tersebut :

1. PNP Salinan putusan yang belum dosetorkan ke Negera	Rp 8.850.000.00
2. Uang pihak ke-3 yang belum dibukukan	Rp 14.777.500.00

Selisih (Saldo Pembukuan - Saldo Fisik)

Rp0.00

Plh. Panitera


SOLVIATI, S.H.,M.H

Tim Pengawas Pengadilan Tinggi Riau


1. NELSON SAMOSIR, SH.,M.H.

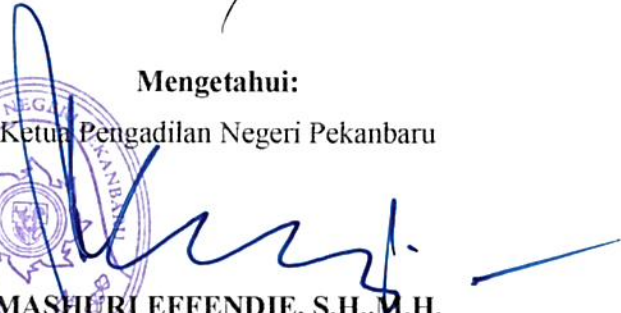
Kasir


HENI HERLINA MANULLANG, A.Md


2. ADETIA PRATAMA. A.Md.

Mengetahui:

Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru


MASHURI EFFENDIE, S.H.,M.H.

CABANG : PEKANBARU
REKENING : GIRO TDK HIT BBB PEMERINTAH
PERIODE TGL : 01/06/2024
S/D : 10/06/2024

HAL : 1

NO. REKENING: 2228007005 KEPADA YTH : RPL 008 PDT PN PEKANBARU UTK BIAYA PERKARA
EMERINTAH
NPWP : 0.098.762.8-216.000 JL TERATAI NO 85
MATAUANG : IDR 000000
Dirgantara 28283
Bukit Raya /Pekanbaru

TGL	TRANS	U R A I A N	DEBET	KREDIT	SALDO
SALDO AWAL					
03 Jun	INT/ATM	TFR ATM MPUT	1.655.000,00	✓	16.417.433.117,00
03 Jun		PEMINDAHAN DARI 1046722333			16.419.088.117,00
03 Jun	INT/ATM	Kartu 6034941046722333 BANK SYARIAH MANDIRI JAKARTA			
03 Jun	INT/ATM	TGL TRX 03/06/2024	16.419.088.117,00		
03 Jun	INT/ATM	BY TRF ATMBE	14.500,00		16.419.102.617,00
03 Jun		9882228024060363 Supemi			
03 Jun		PEMINDAHAN DARI 11082170327790			
03 Jun	INT/ATM	Kartu 5028141100327790 0000000000000000000000 JK			
03 Jun	INT/ATM	TGL TRX 03/06/2024	16.419.102.617,00		
03 Jun	Cab.Pekanb	CSH DEP	264.000,00	✓	16.419.366.617,00
03 Jun		9882228024060364 Natalia			
03 Jun	InetBankin	DEP TFR	667.500,00		16.420.034.117,00
03 Jun		PEMINDAHAN DARI 165076313 Bpk W			
03 Jun	INT/ATM	SNAPVA TRX	760.000,00	✓	16.420.794.117,00
03 Jun		9882228024060361 HELMI YARDI, SH			
03 Jun		PEMINDAHAN DARI 244209765 Ibu HEG			
03 Jun	INT/ATM	Kartu 5198930080734287			
03 Jun	INT/ATM	TGL TRX 03/06/2024	16.420.794.117,00		
03 Jun	Cash Man S	WDL TFR	152.000,00-		16.420.642.117,00
03 Jun		KARTU 6010047890085390 ONLINE 202406035191499282			
03 Jun		Pengembalian Sisa PanjarNo. 281/Pdt.G/2023/Pn Pbr			
03 Jun		PEMINDAHAN KE 902288696 SIMSEM ON			
03 Jun	Cash Man S	WDL TFR	141.000,00-		16.420.501.117,00
03 Jun		KARTU 6010047890085393 ONLINE 202406030091499313			
03 Jun		Pengembalian Sisa PanjarNo. 283/Pdt.G/2023/Pn Pbr			
03 Jun		PEMINDAHAN KE 902288696 SIMSEM ON			
03 Jun	Cash Man S	WDL TFR	188.500,00-		16.420.312.617,00
03 Jun		KARTU 6010047890085652 ONLINE 202406032091499366			
03 Jun		Pengembalian Sisa PanjarNo. 285/Pdt.G/2023/Pn Pbr			
03 Jun		PEMINDAHAN KE 902288696 SIMSEM ON			
03 Jun	Cash Man S	WDL TFR	107.500,00-		16.420.205.117,00
03 Jun		Pengembalian Sisa Panjar No. 289/Pdt.G/2023/Pn Pbr			
03 Jun		PEMINDAHAN KE 124727322 Ibu ERNA			
03 Jun	Cash Man S	WDL TFR	131.500,00-		16.420.073.617,00
03 Jun		KARTU 6010047890085661 ONLINE 202406031091544561			
03 Jun		Pengembalian Sisa PanjarNo. 292/Pdt.G/2023/Pn Pbr			
03 Jun		PEMINDAHAN KE 902288696 SIMSEM ON			
03 Jun	Cash Man S	WDL TFR	157.500,00-		16.419.916.117,00



CABANG : PEKANBARU
REKENING : GIRO TDK HIT BBB PEMERINTAH
PERIODE TGL : 01/06/2024
S/D : 10/06/2024

HAL : 2

NO. REKENING: 2228007005 KEPADA YTH : RPL 008 PDT PN PEKANBARU UTK BIAYA PERKARA
Pemerintah
NPWP : 0.098.762.8-216.000 JL TERATAI NO 85
MATAUANG : IDR 000000
Dirgantara 28283
Bukit Raya /Pekanbaru

TGL	TRANS	U R A I A N	DEBET	KREDIT	SALDO
		SALDO AWAL			16.419.916.117,00
03 Jun		Pengembalian Sisa Panjar No. 296/Pdt.G/2023/Pn Pbr			
03 Jun		PEMINDAHAN KE 574101890 Sdr NURDI			
03 Jun	Cash Man S	WDL TFR 174.500,00-			16.419.741.617,00
03 Jun		KARTU 6010047890085665 ONLINE 202406030691564710			
03 Jun		Pengembalian Sisa PanjarNo. 297/Pdt.G/2023/Pn Pbr			
03 Jun		PEMINDAHAN KE 902288696 SIMSEM ON			
04 Jun	InetBankin	DEP TFR	100.000.000,00		16.519.741.617,00
04 Jun		By Perkara Konsinyasi No 13			
04 Jun		PEMINDAHAN DARI 1851745039 YUNIA			
04 Jun	Cab.Pekanb	CSH DEP		310.500,00	16.520.052.117,00
04 Jun		9882228024060369 NELLY MAFLES VERONIKA			
04 Jun	INT/ATM	TRFR ATMALTO		110.000,00	16.520.162.117,00
04 Jun		9882228024060367 ANGELO THOMAS			
04 Jun		PEMINDAHAN DARI 343380841			
04 Jun	INT/ATM	Kartu 5307952065839897 0000000000000000000000			
04 Jun	INT/ATM	TGL TRX 04/06/2024		16.520.162.117,00	
04 Jun	InetBankin	BI FAST IN		1.100.000,00	16.521.262.117,00
04 Jun		DEWISEPTRIANY			
04 Jun		PEMINDAHAN DARI 7132722816			
04 Jun	InetBankin	TGL TRX 04/06/2024		16.521.262.117,00	
04 Jun	Mobile Ban	DEP TFR		667.500,00	16.521.929.617,00
04 Jun		9882228024060365 WIDARGO			
04 Jun		PEMINDAHAN DARI 495154161 Bpk MAY			
04 Jun	INT/ATM	TRFR ATM PRI		467.500,00	16.522.397.117,00
04 Jun		9882228024060371 LBH-Pembela Rakyat Mado Tafonao			
04 Jun	INT/ATM	Kartu 6013012005247116 0000000000000000000000JAKARTA JK			
04 Jun	INT/ATM	TGL TRX 04/06/2024		16.522.397.117,00	
04 Jun	Cab.Pekanb	CSH DEP		110.000,00	16.522.507.117,00
04 Jun		9882228024060368 JULIANUS GULO			
04 Jun	INT/ATM	BY TRF ATMBE		14.000,00	16.522.521.117,00
04 Jun		9882228024060373 RENIWATI			
04 Jun		PEMINDAHAN DARI 1080027383398			
04 Jun	INT/ATM	Kartu 6032989911203908 0000000000000000000000			
04 Jun	INT/ATM	TGL TRX 04/06/2024		16.522.521.117,00	
04 Jun	INT/ATM	TRFR ATMALTO		4.195.000,00	16.526.716.117,00
04 Jun		PEMINDAHAN DARI 870213042			
04 Jun	INT/ATM	Kartu 5260512033986272 0000000000000000000000PEKANBARU			



HAL: 3

KEPADA YTH : RPL 008 PDT PN PEKANBARU UTK BIAYA PERKARA

JL. TERATAI NO 85

28283

/Pekanbaru

SALDO



HAL: 4

KEPADA YTH : RPL 008 PDT PN PEKANBARU UTK BIAYA PERKARA

JL TERATAI NO 85

28283

/Pekanbaru

SALDO

CABANG : PEKANBARU
REKENING : GIRO TDK HIT BBB PEMERINTAH
PERIODE TGL : 01/06/2024
S/D : 10/06/2024

HAL : 5

NO. REKENING: 2228007005 KEPADA YTH : RPL 008 PDT PN PEKANBARU UTK BIAYA PERKARA
PEMERINTAH
NPWP : 0.098.762.8-216.000 JL TERATAI NO 85
MATAUANG : IDR 000000
Dirgantara 28283
Bukit Raya /Pekanbaru

TGL	TRANS	U R A I A N	DEBET	KREDIT	SALDO
		SALDO AWAL			16.545.903.617,00
05 Jun	INT/ATM	Kartu 5198930080734287			
05 Jun	INT/ATM	TGL TRX 05/06/2024		16.545.903.617,00	
05 Jun	Cab.Pekanb	CAS CASH CHECB531789 25.000.000,00-			16.520.903.617,00
05 Jun		RPL 008 PDT PN PEKANBARU UTK BIAYA PERKARA			
05 Jun	INT/ATM	BY TRF ATMBE		317.500,00	16.521.221.117,00
05 Jun		9882228024060386 Berman Manurung, SH. MBA			
05 Jun		PEMINDAHAN DARI 107901009349532			
05 Jun	INT/ATM	Kartu 6013012230501113 0000000000000000000000		JK	
05 Jun	INT/ATM	TGL TRX 05/06/2024		16.521.221.117,00	
05 Jun	Cash Man S	WDL TFR 148.000,00-			16.521.073.117,00
05 Jun		KARTU 6010047890205469 ONLINE 202406055192654204			
05 Jun		Pengembalian Sisa PanjarNo. 308/Pdt.G/2023/Pn Pbr			
05 Jun		PEMINDAHAN KE 902288696 SIMSEM ON			
05 Jun	Cash Man S	WDL TFR 314.000,00-			16.520.759.117,00
05 Jun		Pengembalian Panjar 2 kali Transfer TRF TO:000000			
05 Jun		PEMINDAHAN KE 1851745039 YUNIANI			
05 Jun	Cash Man S	WDL TFR 667.500,00-			16.520.091.617,00
05 Jun		Pengembalian Panjar 2 kali Transfer TRF TO:000000			
05 Jun		PEMINDAHAN KE 165076313 Bpk WID			
05 Jun	Cash Man S	WDL TFR 6.888.000,00-			16.513.203.617,00
05 Jun		Pengembalian Sisa Panjar Eksekusi No. 73/Pdt.Eks-H			
05 Jun		PEMINDAHAN KE 165076313 Bpk WID			
05 Jun	Cash Man S	WDL TFR 3.080.000,00-			16.510.123.617,00
05 Jun		Pengembalian Sisa Panjar Eksekusi No. 75/Pdt.Eks-H			
05 Jun		PEMINDAHAN KE 165076313 Bpk WID			
06 Jun	INT/ATM	TRFR ATMALTO 476.000,00			16.510.599.617,00
06 Jun		9882228024060394 Siwamzi,SH			
06 Jun		PEMINDAHAN DARI 343477055			
06 Jun	INT/ATM	Kartu 6019007597696609 0000000000000000000000			
06 Jun	INT/ATM	TGL TRX 05/06/2024		16.510.599.617,00	
06 Jun	INT/ATM	TRFR ATM PRI 14.500,00			16.510.614.117,00
06 Jun		9882228024060393 HEPPY SOAR TUA RAJA GUK GUK, SH			
06 Jun	INT/ATM	Kartu 6013012220221623 0000000000000000000000JAKARTA		JK	
06 Jun	INT/ATM	TGL TRX 06/06/2024		16.510.614.117,00	
06 Jun	INT/ATM	BY TRF ATMBE 23.000,00			16.510.637.117,00
06 Jun		9882228024060397 TONGKU SOLAH HAMONANGAN DAULAY SH			
06 Jun		PEMINDAHAN DARI 11085260958583			
06 Jun	INT/ATM	Kartu 5028141100958583 0000000000000000000000		JK	



HAL: 6

KEPADA YTH : RPL 008 PDT PN PEKANBARU UTK BIAYA PERKARA

JL TERATAI NO 85

28283

/Pekanbaru

SALDO AWAL							16.510.637.117,00
06 Jun	INT/ATM	TGL TRX	16/04/2024	16.510.637.117,00			
06 Jun	INT/ATM	TRFR ATM PRI		110.000,00			16.510.747.117,00
06 Jun		9882228024060398 Rizky Mauludi Syukur					
06 Jun	INT/ATM	Kartu 5221840971085361	00000000000000000000JAKARTA			JK	
06 Jun	INT/ATM	TGL TRX	06/06/2024	16.510.747.117,00			
06 Jun	INT/ATM	BY TRF ATMBE		18.500,00			16.510.765.617,00
06 Jun		9882228024060395 SUCIPTO SIHITE, SH					
06 Jun		PEMINDAHAN DARI 69401017065501					
06 Jun	INT/ATM	Kartu 5221841192272564	00000000000000000000RI				
06 Jun	INT/ATM	TGL TRX	06/06/2024	16.510.765.617,00			
06 Jun	Mobile Ban	DEP TFR		14.500,00			16.510.780.117,00
06 Jun		9882228024060399 LENI VIVIENDRI					
06 Jun		PEMINDAHAN DARI 1193032240 Sdri C					
06 Jun	Cab.Pekanb	CSH DEP		2.500.000,00			16.513.280.117,00
06 Jun		Ibu EKA MEDIELY					
06 Jun	Cab.Pekanb	CSH DEP		14.000,00			16.513.294.117,00
06 Jun		9882228024060401 Nurhajati Argo Surjo					
06 Jun	Cab.Pekanb	CSH DEP		1.100.000,00			16.514.394.117,00
06 Jun		BiayaPerkara PS No.17/Pdt.G/204/PN.PBR					
06 Jun		DENI ELFIRMAN					
06 Jun	INT/ATM	BY TRF ATMBE		18.500,00			16.514.412.617,00
06 Jun		9882228024060402 KUON SIANTURI,SH					
06 Jun		PEMINDAHAN DARI 11081315150139					
06 Jun	INT/ATM	Kartu 5028141105150139	00000000000000000000JK				
06 Jun	INT/ATM	TGL TRX	06/06/2024	16.514.412.617,00			
06 Jun	INT/ATM	TFR ATM MPUT		15.000,00			16.514.427.617,00
06 Jun		9882228024060403 HARDI WIRANATA					
06 Jun	INT/ATM	Kartu 6221007799999999 BTNMoblie	JAKARTA DK				
06 Jun	INT/ATM	TGL TRX	06/06/2024	16.514.427.617,00			
06 Jun	Cash Man S	WDL TFR	316.000,00-				16.514.111.617,00
06 Jun		KARTU 6010047890261309 ONLINE 202406061193107146					
06 Jun		Pengembalian Sisa PanjarNo. 314/Pdt.G/2023/Pn Pbr					
06 Jun		PEMINDAHAN KE 902288696 SIMSEM ON					
06 Jun	Mobile Ban	DEP TFR		73.000,00			16.514.184.617,00
06 Jun		9882228024060404 Davidson Sembiring					
06 Jun		PEMINDAHAN DARI 333090859 Sdri MA					
06 Jun	Cab.Pekanb	CSH DEP		14.500,00			16.514.199.117,00
07 Jun		9882228024060406 Rudi sugiarito					



HAL: 7

KEPADA YTH : RPL 008 PDT PN PEKANBARU UTK BIAYA PERKARA

JL TERATAI NO 85

Dirgantara

28283

Bukit Raya

/Рекапбул

TRANS

U R A I A N

DEBET

KREDIT

SALDO

No	Tipe Transaksi	Nama Pelanggan	Saldo Awal	Saldo Akhir
07 Jun	INT/ATM	TRFR ATM PRI	110.000,00	16.514.199.117,00
07 Jun		9882228024060407 INUAR HAREFA		16.514.309.117,00
07 Jun	INT/ATM	Kartu 6013014016627294 00000000000000000000JAKARTA JK		
07 Jun	INT/ATM	TGL TRX 07/06/2024	16.514.309.117,00	
07 Jun	INT/ATM	TRFR ATMALTO	13.500,00	16.514.322.617,00
07 Jun		9882228024060408 Butet Marthalena		
07 Jun		PEMINDAHAN DARI 343067825		
07 Jun	INT/ATM	Kartu 5307952085812973 0000000000000000000000		
07 Jun	INT/ATM	TGL TRX 07/06/2024	16.514.322.617,00	
07 Jun	INT/ATM	TRFR ATM PRI	120.000,00	16.514.442.617,00
07 Jun		9882228024060409 DEDI RUSTIANA		
07 Jun	INT/ATM	Kartu 5221841141527324 00000000000000000000JAKARTA JK		
07 Jun	INT/ATM	TGL TRX 07/06/2024	16.514.442.617,00	
07 Jun	INT/ATM	BY TRF ATMBE	14.000,00	16.514.456.617,00
07 Jun		9882228024060411 Syahrizal D		
07 Jun		PEMINDAHAN DARI 1080094110088		
07 Jun	INT/ATM	Kartu 6032989914193469 0000000000000000000000		
07 Jun	INT/ATM	TGL TRX 07/06/2024	16.514.456.617,00	
07 Jun	INT/ATM	TRFR ATMALTO	16.500,00	16.514.473.117,00
07 Jun		9882228024060413 HENDYJOHN SPANDY		
07 Jun		PEMINDAHAN DARI 3678979612		
07 Jun	INT/ATM	Kartu 5895874301733403 0000000000000000000000 JKT		
07 Jun	INT/ATM	TGL TRX 07/06/2024	16.514.473.117,00	
07 Jun	Mobile Ban	DEF TFR	1.092.000,00	16.515.565.117,00
07 Jun		9882228024060414 ozi nofandi		
07 Jun		PEMINDAHAN DARI 328566156 Sdr OZI		
07 Jun	INT/ATM	BY TRF ATMBE	110.000,00	16.515.675.117,00
07 Jun		9882228024060416 Ilmy Syahfitri		
07 Jun		PEMINDAHAN DARI 1080016438930		
07 Jun	INT/ATM	Kartu 6032989911687433 0000000000000000000000		
07 Jun	INT/ATM	TGL TRX 07/06/2024	16.515.675.117,00	
07 Jun	Cash Man S	WDL TFR	667.000,00-	16.515.008.117,00
07 Jun		KARTU 6010047890319118 ONLINE 202406070193390161		
07 Jun		Pengembalian Sisa PanjarNo. 7/Pdt.G/2024/Pn Pbr		
07 Jun		PEMINDAHAN KE 902288696 SIMSEM ON		
07 Jun	Cash Man S	WDL TFR	144.000,00-	16.514.864.117,00
07 Jun		KARTU 6010047890319133 ONLINE 202406074593390772		
07 Jun		Pengembalian Sisa PanjarNo. 12/Pdt.G/2024/Pn Pbr		



CABANG : PEKANBARU
REKENING : GIRO TDK HIT BBB PEMERINTAH
PERIODE TGL : 01/06/2024
S/D : 10/06/2024

NO. REKENING: 2228007005 KEPADA YTH : RPL 008 PDT PN PEKANBARU UTK BIAYA PERKARA
MERINTAH
NPWP : 0.098.762.8-216.000 JL TERATAI NO 85
MATAUANG : IDR 000000
Dirgantara 28283
Bukit Raya /Pekanbaru

TGL	TRANS	U R A I A N	DEBET	KREDIT	SALDO
SALDO AWAL					16.514.864.117,00
07 Jun		PEMINDAHAN KE 902288696 SIMSEM ON			
07 Jun	Cash Man S	WDL TFR	107.500,00-		16.514.756.617,00
07 Jun		KARTU 6010047890319952 ONLINE 202406075293391054			
07 Jun		Pengembalian Sisa PanjarNo. 20/Pdt.G/2024/Pn Pbr			
07 Jun		PEMINDAHAN KE 902288696 SIMSEM ON			
07 Jun	Cash Man S	WDL TFR	254.000,00-		16.514.502.617,00
07 Jun		Pengembalian Sisa Panjar No. 21/Pdt.G/2024/Pn Pbr			
07 Jun		PEMINDAHAN KE 917869403 Bpk TONGK			
07 Jun	Cash Man S	WDL TFR	118.000,00-		16.514.384.617,00
07 Jun		KARTU 6010047890319963 ONLINE 202406071993391816			
07 Jun		Pengembalian Sisa PanjarNo. 26/Pdt.G/2024/Pn Pbr			
07 Jun		PEMINDAHAN KE 902288696 SIMSEM ON			
07 Jun	InetBankin	DEP TFR		448.000,00	16.514.832.617,00
07 Jun		9882228024060417 Hizam Alnazri,SE.,SH.,MH			
07 Jun		Panjar biaya perkara			
07 Jun		PEMINDAHAN DARI 195494857 Bpk HIZ			
07 Jun	Mobile Ban	DEP TFR		24.500,00	16.514.857.117,00
07 Jun		9882228024060410 Musnadul firdausi			
07 Jun		PEMINDAHAN DARI 1732286296 MUSNA			
07 Jun	INT/ATM	TRFR ATM PRI		317.500,00	16.515.174.617,00
07 Jun		9882228024060418 MUHAMMAD AMIN, SH			
07 Jun	INT/ATM	Kartu 6274921303554045 000000000000000000000000 PEKANBARU JK			
07 Jun	INT/ATM	TGL TRX 07/06/2024		16.515.174.617,00	
07 Jun	INT/ATM	TRFR ATM PRI		17.500,00	16.515.192.117,00
08 Jun		9882228024060419 PT Hafla Putra rambah			
08 Jun	INT/ATM	Kartu 5221845030585855 000000000000000000000000JAKARTA JK			
08 Jun	INT/ATM	TGL TRX 08/06/2024		16.515.192.117,00	
10 Jun	InetBankin	DEP TFR		62.500,00	16.515.254.617,00
10 Jun		9882228024060422 Leonardo manalu			
10 Jun		PEMINDAHAN DARI 1473606403 Sdr LE			
10 Jun	INT/ATM	TRFR ATMALTO		120.000,00	16.515.374.617,00
10 Jun		9882228024060423 SRI HERLINA			
10 Jun		PEMINDAHAN DARI 8230227838			
10 Jun	INT/ATM	Kartu 5307952086731164 000000000000000000000000			
10 Jun	INT/ATM	TGL TRX 10/06/2024		16.515.374.617,00	
10 Jun	INT/ATM	TRFR ATM PRI		19.500,00	16.515.394.117,00
10 Jun		9882228024060424 Badri Alaina Syafri			
10 Jun	INT/ATM	Kartu 6013012250901250 000000000000000000000000JAKARTA JK			



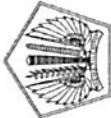
CABANG : PEKANBARU
REKENING : GIRO TDK HIT BBB PEMERINTAH
PERIODE TGL : 01/06/2024
S/D : 10/06/2024

HAL : 9

NO. REKENING: 2228007005 KEPADA YTH : RPL 008 PDT PN PEKANBARU UTK BIAYA PERKARA
MERINTAH
NPWP : 0.098.762.8-216.000 JL TERATAI NO 85
MATAUANG : IDR 000000
Dirgantara 28283
Bukit Raya /Pekanbaru

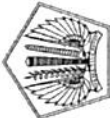
TGL	TRANS	U R A I A N	DEBET	KREDIT	SALDO
		SALDO AWAL			16.515.394.117,00
10 Jun	INT/ATM	TGL TRX 10/05/2024		16.515.394.117,00	
10 Jun	INT/ATM	TRF ATM MPU1		1.100.000,00	16.516.494.117,00
10 Jun		PEMINDAHAN DARI 1080022955430			
10 Jun	INT/ATM	Kartu 4617003743627474 AHMAD YANI SS12 PEKANBARU FBN2			
10 Jun	INT/ATM	TGL TRX 10/06/2024		16.516.494.117,00	
10 Jun	*****	DEP TFR		667.000,00	16.517.161.117,00
10 Jun		2228007005 Rtr OL Single			
10 Jun		PEMINDAHAN DARI 902288696 SIMSEM			
10 Jun		Tgl. 07/06/2024			
10 Jun		Reff : 20240606174541819662			
10 Jun	INT/ATM	BY TRF ATMBE		16.500,00	16.517.177.617,00
10 Jun		9882228024060425 Refi Yulianto S.H			
10 Jun		PEMINDAHAN DARI 1080011142495			
10 Jun	INT/ATM	Kartu 6032989911516394 0000000000000000000000			
10 Jun	INT/ATM	TGL TRX 10/06/2024		16.517.177.617,00	
10 Jun	INT/ATM	TRFR ATM PRI		110.000,00	16.517.287.617,00
10 Jun		9882228024060426 UNGGUL DARU ABADI			
10 Jun	INT/ATM	Kartu 5221840982634090 0000000000000000000000JAKARTA JK			
10 Jun	INT/ATM	TGL TRX 10/06/2024		16.517.287.617,00	
10 Jun	INT/ATM	BY TRF ATMBE		14.500,00	16.517.302.117,00
10 Jun		9882228024060427 MARLENI SIREGAR			
10 Jun		PEMINDAHAN DARI 9936401047			
10 Jun	INT/ATM	Kartu 4262543331219828 0000000000000000000000 JK			
10 Jun	INT/ATM	TGL TRX 10/06/2024		16.517.302.117,00	
		AKHIR DARI REKENING			





PAGU DAN REALISASI BELANJA

No	BA-Satker	Nama Satker	KPPN	Ket	Jenis Belanja									Total
					Pegawai	Barang	Modal	Beban Bunga	Subsidi	Hibah	Bansos	Lain-lain	Transfer	
1	005-098849	PENGADILAN NEGERI PEKANBARU	008	PAGU	9,793,264,000	2,458,764,000	0	0	0	0	0	0	0	12,252,028,000
				REALISASI	6,985,261,643	954,103,884	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	7,939,365,527	
				PERSENTASE	(71.33%)	(38.80%)						(64.80%)		
				SISA	2,808,002,357	1,504,660,116	0	0	0	0	0	0	4,312,662,473	
				PAGU	9,793,264,000	2,458,764,000	0	0	0	0	0	0	12,252,028,000	
				REALISASI	6,985,261,643	954,103,884	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	7,939,365,527	
				PERSENTASE	(71.33%)	(38.80%)							(64.80%)	
			TOTAL	SISA	2,808,002,357	1,504,660,116	0	0	0	0	0	0	4,312,662,473	



PAGU DAN REALISASI BELANJA

No	BA-Satker	Nama Satker	KPPN	Ket	Jenis Belanja									Total	
					Pegawai	Barang	Modal	Beban Bunga	Subsidi	Hibah	Bansos	Lain-lain	Transfer		
1	005-099214	PENGADILAN NEGERI PEKANBARU	008	PAGU REALISASI PERSENTASE	0	548,190,000 171,312,800 (31.25%)	0	0	0	0	0	0	0	0	548,190,000 171,312,800 (31.25%)
				SISA	0	376,877,200	0	0	0	0	0	0	0	0	376,877,200
				PAGU REALISASI PERSENTASE	0	548,190,000 171,312,800 (31.25%)	0	0	0	0	0	0	0	0	548,190,000 171,312,800 (31.25%)
			TOTAL	SISA	0	376,877,200	0	0	0	0	0	0	0	0	376,877,200

SESILIYA RAHAYU, S.E.
NIP. 19850929 200912 2 005

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN

Bulan: Juni 2024

Kementerian/Lembaga : (005) MAHKAMAH AGUNG

Tgl, No. SP : 24 November 2023 , DIPA-005.01.2.098849/2024

Unit Organisasi : (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI

Tahun : 2024

Provinsi/Kabupaten/Kota : (09.51) RIAU / KOTA PEKANBARU

KPPN : (008) Pekanbaru

Satuan Kerja : (098849) PENGADILAN NEGERI PEKANBARU

Alamat dan No Telp :

I. Keadaan Pembukuan bulan pelaporan dengan saldo pada BKU sebesar Rp. 13.209.686,00 Dan Nomor Bukti terakhir Nomor. 00522/KW/098849/2024

	Jenis Buku Pembantu	Saldo Awal (Rp.)	Penambahan (Rp.)	Pengurangan (Rp.)	Saldo Akhir (Rp.)
1	2	3	4	5	6
A	BP Kas, BPP dan UM	45.000.000,00	0,00	31.790.314,00	13.209.686,00
	1. BP Kas (Tunai & Bank)	45.000.000,00	0,00	31.790.314,00	13.209.686,00
	2. BP UM (Voucher)	0,00	0,00	0,00	0,00
	3. BP BPP	0,00	0,00	0,00	0,00
B	BP Selain Kas	45.000.000,00	0,00	31.790.314,00	13.209.686,00
	1. BP UP*)	45.000.000,00	0,00	31.790.314,00	13.209.686,00
	2. BP TUP*)	0,00	0,00	0,00	0,00
	3. BP LS-Bendahara	0,00	0,00	0,00	0,00
	4. BP Pajak	0,00	0,00	0,00	0,00
	5. BP Hibah	0,00	0,00	0,00	0,00
	6. BP Lain-lain	0,00	0,00	0,00	0,00

*) jumlah pengurangan sudah termasuk kuitansi UP yang belum di-SPM-kan sebesar Rp. 31.790.314,00

*) jumlah pengurangan sudah termasuk kuitansi TUP yang belum di-SPM-kan sebesar Rp. 0,00

II. Keadaan kas pada akhir Bulan Pelaporan

1. Uang Tunai di Brankas	Rp.	13.209.700,00	
2. Uang di Rekening Bank	Rp.	0,00	(terlampir salinan rekening koran)
3. Jumlah Kas	Rp.	13.209.700,00	

III. Selisih Kas

1. Saldo Akhir BP Kas	Rp.	13.209.686,00
2. Jumlah Kas (II.3)	Rp.	13.209.700,00
3. Selisih Kas	Rp.	(14,00)

IV. Hasil Rekonsiliasi Internal dengan UAKPA

A. UP

1. Saldo UP	Rp.	13.209.686,00
2. Kwitansi UP belum di SPJ-kan	Rp.	31.790.314,00
3. Jumlah Saldo dan Kwitansi UP	Rp.	45.000.000,00
4. Saldo UP menurut UAKPA	Rp.	45.000.000,00
5. Selisih Pembukuan UP	Rp.	0,00

B. TUP

1. Saldo TUP	Rp.	0,00
2. Kwitansi TUP belum di SPJ-kan	Rp.	0,00
3. Jumlah Saldo dan Kwitansi TUP	Rp.	0,00
4. Saldo TUP menurut UAKPA	Rp.	0,00
5. Selisih Pembukuan TUP	Rp.	0,00

C. Lainnya

1. Saldo Lainnya	Rp.	0,00
2. Saldo Lainnya Menurut UAKPA	Rp.	0,00
3. Selisih Pembukuan Lainnya	Rp.	0,00

V. Penjelasan Selisih Kas dan / atau selisih pembukuan UP (apabila ada)

- 1. Karna ketiadaan uang kecil
- 2.

Mengetahui
Kuasa Pengguna Anggaran



ERRY MARDIANTO, ST, SH
NIP 197603012005021001

KOTA PEKANBARU, Juni 2024
Bendahara Pengeluaran



LUSIANA FEBRIANY, S.KOM
NIP 198802282011012012

I. Hasil Pemeriksaan Pembukuan Bendahara

A. Saldo Kas Bendahara

1	Saldo BP Kas (Tunai dan Bank)	Rp.	13.209.686
2	Saldo BP UM (Voucher)	Rp.	0
3	Saldo BP BPP	Rp.	0
4	Jumlah (A1+A2+A3)	Rp.	13.209.686

B. Saldo Kas tersebut pada huruf A terdiri dari :

1	Saldo BP UP	Rp.	13.209.686
2	Saldo BP TUP	Rp.	0
3	Saldo LS-Bendahara	Rp.	0
4	Saldo Pajak	Rp.	0
5	Saldo Hibah	Rp.	0
6	Saldo BP Lain-lain	Rp.	0
7	Jumlah (B1+B2+B3+B4+B5+B6)	Rp.	13.209.686

C.	Selisih pembukuan (A4-B6)	Rp.	0
----	---------------------------	-----	---

II. Hasil Pemeriksaan Kas (Fisik)

A. Kas yang dikuasai bendahara

1	Uang Tunai di Kas Bendahara	Rp.	13.209.700
2	Uang di Rekening Bendahara	Rp.	0
3	Jumlah Kas (A1+A2)	Rp.	13.209.700

B.	Selisih Kas (I.A.I-II.A.3)	Rp.	- 14
----	----------------------------	-----	------

III. Hasil Rekonsiliasi Internal

A. Pembukuan menurut Bendahara

1	a.	Saldo UP	Rp.	13.209.686
	b.	Kuitansi UP yang belum di-SPM-kan	Rp.	31.790.314
	c.	Jumlah Saldo dan Kuitansi UP	Rp.	45.000.000
2	a.	Saldo TUP	Rp.	0
	b.	Kuitansi TUP yang belum di-SPM-kan	Rp.	0
	c.	Jumlah Saldo dan Kuitansi TUP	Rp.	0
3		Saldo Lainnya	Rp.	0
4		Jumlah (A1+A2+A3)	Rp.	45.000.000

B. Pembukuan menurut UAKPA

1	Kas UP di Bendahara	Rp.	45.000.000
2	Kas TUP di Bendahara	Rp.	0
3	Kas Lainnya di Bendahara	Rp.	0
4	Jumlah (B1+B2+B3)	Rp.	45.000.000

C.	Selisih Pembukuan Bendahara dengan UAKPA (III.A.4-III.B.4)	Rp.	0
----	---	-----	---

IV. Penjelasan atas selisih

A. Selisih Kas (II.B)

Karna ketiadaan uang kecil

B. Selisih Pembukuan UP (III.C)

Yang diperiksa
Bendahara Pengeluaran

LUSIANA FEBRIANY, S.KOM
NIP 198802282011012012

Mengetahui
Kuasa Pengguna Anggaran

ERRY MARDIANTO, ST, SH
NIP 197603012005021001

BUKU KAS UMUM

Periode Juni 2024

Departemen/Lembaga : (005) MAHKAMAH AGUNG
Unit Organisasi : (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI
Propinsi/Kabupaten/Kota : (09.51) RIAU / KOTA PEKANBARU
Satuan Kerja : (098849) PENGADILAN NEGERI PEKANBARU
Tanggal, No SP DIPA : 28 November 2023, DIPA-005.01.2.098849/2024
Jumlah Pagu Per Kelompok Belanja : (52) Rp. 2.458.764.000,00
Tahun Anggaran : 2024
KPPN : (008) Pekanbaru

Mengetahui
Kuasa Pengguna Anggaran



ERRY MARDIANTO, ST, SH
NIP 197603012005021001

KOTA PEKANBARU, 10 Juni 2024
Bendahara Pengeluaran,



LUSIANA FEBRIANY, S.KOM
NIP 198802282011012012

Tgl	No Bukti	Uraian	Debet (Rp.)	Kredit (Rp.)	Saldo (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Saldo Akhir Bulan Mei 2024			45.000.000,00
02/06/2024	00460/KW/098849/2024	Yuni (LUSIANA FEBRIANY) Biaya pembelian bahan bakar kendaraan dians roda 4 (empat) BM 1490 TP pada tanggal 28/05/2024	0,00	904.630,00	44.095.370,00
02/06/2024	00463/KW/098849/2024	Yuni (LUSIANA FEBRIANY) Biaya pembelian 3 buah jam dinding untuk ruang sidang	0,00	825.000,00	43.270.370,00
02/06/2024	00457/KW/098849/2024	Riky (LUSIANA FEBRIANY) Biaya pembelian bahan bakar kendaraan dinas roda 4 (Empat) BM 1271 A pada tanggal 28/05/2024	0,00	611.000,00	42.659.370,00
02/06/2024	00464/KW/098849/2024	Yuni (LUSIANA FEBRIANY) Biaya pembelian bunga bunga untuk taman kantor	0,00	540.000,00	42.119.370,00
02/06/2024	00461/KW/098849/2024	MGS (LUSIANA FEBRIANY) Biaya pembelian bahan bakar kendaran dinas roda 2 (dua) BM 2085 TP	0,00	400.000,00	41.719.370,00
02/06/2024	00459/KW/098849/2024	Erry Mardianto (LUSIANA FEBRIANY) Biaya pembelian bahan bakar kendaraan dinas roda 4 (Empat) BM 1470 TP pada tanggal 30/05/2024	0,00	400.000,00	41.319.370,00
02/06/2024	00458/KW/098849/2024	Bayu (LUSIANA FEBRIANY) Biaya pembelian bahan bakar kendaraan dinas roda 4 (empat) BM 1783 TP pada tanggal 29/05/2024	0,00	382.800,00	40.936.570,00
02/06/2024	00468/KW/098849/2024	Rohimi (LUSIANA FEBRIANY) Biaya pembelian bahan bangunan sperti keramik, pasir,dll untuk perbakan keramik pecah ruang pidana	0,00	350.000,00	40.586.570,00
02/06/2024	00471/KW/098849/2024	Arnol (LUSIANA FEBRIANY) Biaya pembelian air minum untuk ruang pimpinan, ptsp	0,00	206.000,00	40.380.570,00
02/06/2024	00467/KW/098849/2024	Dewi (LUSIANA FEBRIANY) Blaya pembayaran jasa setling sound system ptsp	0,00	200.000,00	40.180.570,00
02/06/2024	00465/KW/098849/2024	Fitria (LUSIANA FEBRIANY) Biaya pemeliharaan service laptop	0,00	200.000,00	39.980.570,00
02/06/2024	00462/KW/098849/2024	Arnol (LUSIANA FEBRIANY) Biaya pembelian bahan bakar kendaraan dinas roda 2 (dua) BM 2099 , Bm 3054 TP	0,00	140.084,00	39.840.486,00
02/06/2024	00469/KW/098849/2024	Roni (LUSIANA FEBRIANY) Biaya pembayaran tagihan koran riau pos bulan April 2024	0,00	120.000,00	39.720.486,00
02/06/2024	00466/KW/098849/2024	Hengki (LUSIANA FEBRIANY) Biaya pembelian token rumah dinas no id 181100197235 jalan harapan raya	0,00	103.000,00	39.617.486,00
02/06/2024	00470/KW/098849/2024	Tarudin (LUSIANA FEBRIANY) Biaya pembelian bahan baakr	0,00	95.000,00	39.522.486,00

Tgl	No Bukti	Uraian	Debet (Rp.)	Kredit (Rp.)	Saldo (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		kendaraan dinas roda 2 (dua) Bm 3054 TP			
02/06/2024	00472/KW/098849/2024	Rohimi (LUSIANA FEBRIANY) Biaya pembelian permen untuk jamuan tamu di ptsp	0,00	67.400,00	39.455.086,00
03/06/2024	00474/KW/098849/2024	Arnol (LUSIANA FEBRIANY) Biaya pembelian drum tong sampah sebanyak 3 buah	0,00	975.000,00	38.480.086,00
03/06/2024	00478/KW/098849/2024	Misran (LUSIANA FEBRIANY) Blaya Cetak Akrilik	0,00	900.000,00	37.580.086,00
03/06/2024	00486/KW/098849/2024	Arnol (LUSIANA FEBRIANY) Biaya pemeliharaan kendaraan dinas roda 2 (dua) Bm 2084 TP	0,00	585.000,00	36.995.086,00
03/06/2024	00484/KW/098849/2024	Riky (LUSIANA FEBRIANY) Biaya pembelian bahan bakar kendaraan dinas roda 4 (empat) BM 1271 A	0,00	500.000,00	36.495.086,00
03/06/2024	00482/KW/098849/2024	Cantopra (LUSIANA FEBRIANY) Biaya pembelian bahan bakar kendaraan dinas roda 4 (empat) BM 1578tp	0,00	500.000,00	35.995.086,00
03/06/2024	00483/KW/098849/2024	Siswanto (LUSIANA FEBRIANY) Biaya pembaayran upah pemotongan rumput rumah dinas harapan raya	0,00	450.000,00	35.545.086,00
03/06/2024	00481/KW/098849/2024	Misran (LUSIANA FEBRIANY) Pembelian Akrilik Berbagai Ruangan	0,00	450.000,00	35.095.086,00
03/06/2024	00475/KW/098849/2024	Misran (LUSIANA FEBRIANY) Biaya cetak mading dan cetak spanduk hari pancasila	0,00	420.000,00	34.675.086,00
03/06/2024	00479/KW/098849/2024	Arnol (LUSIANA FEBRIANY) Biaya Pembelian Tissue	0,00	325.000,00	34.350.086,00
03/06/2024	00476/KW/098849/2024	Arnol (LUSIANA FEBRIANY) Biaya Pembelian Bola Lampu 26 Watt	0,00	180.000,00	34.170.086,00
03/06/2024	00480/KW/098849/2024	Arnol (LUSIANA FEBRIANY) Biaya Pembelian Tali Bendera 15 M	0,00	100.000,00	34.070.086,00
03/06/2024	00485/KW/098849/2024	Cantopra (LUSIANA FEBRIANY) Biaya pemeliharaan kendaraan dinas roda 4 (empat) BM 1578 TF	0,00	50.000,00	34.020.086,00
03/06/2024	00477/KW/098849/2024	Arnol (LUSIANA FEBRIANY) Biaya Pembelian Bola Lampu 9 watt	0,00	39.000,00	33.981.086,00
04/06/2024	00488/KW/098849/2024	Mella (LUSIANA FEBRIANY) Pembelian pengharum Ruangan,dll	0,00	974.400,00	33.006.686,00
04/06/2024	00491/KW/098849/2024	Taruddin (LUSIANA FEBRIANY) Biaya pembelian bracker MCCB 250A	0,00	900.000,00	32.106.686,00
04/06/2024	00490/KW/098849/2024	Misran (LUSIANA FEBRIANY) Biaya Cetak Foto, cetak stiker,dll	0,00	845.000,00	31.261.686,00
04/06/2024	00494/KW/098849/2024	Leo (LUSIANA FEBRIANY) Biaya penggantian kapasitor	0,00	306.000,00	30.955.686,00

Tgl	No Bukti	Uraian	Debet (Rp.)	Kredit (Rp.)	Saldo (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		kompresor			
04/06/2024	00489/KW/098849/2024	Mella (LUSIANA FEBRIANY) Pembelian Pengharum Ruangan	0,00	230.400,00	30.725.286,00
04/06/2024	00487/KW/098849/2024	Randa (LUSIANA FEBRIANY) Biaya Pembelian Kaca Meja ruang umum	0,00	190.000,00	30.535.286,00
04/06/2024	00492/KW/098849/2024	Yuni (LUSIANA FEBRIANY) Biaya pemeliharaan kendaraan dinas roda 4 (empat) BM 1490 TP	0,00	124.000,00	30.411.286,00
04/06/2024	00493/KW/098849/2024	Rohimi (LUSIANA FEBRIANY) Biaya pembelian acid citrid	0,00	50.000,00	30.361.286,00
05/06/2024	00495/KW/098849/2024	Rohimi (LUSIANA FEBRIANY) Biaya Pengecatan ruang tahanan (bagian dalam) sebanyak 4 ruangan	0,00	3.640.000,00	26.721.286,00
05/06/2024	00496/KW/098849/2024	Randa (LUSIANA FEBRIANY) Blaya pembelian bahan bakar untuk genset	0,00	1.500.000,00	25.221.286,00
05/06/2024	00498/KW/098849/2024	Randa (LUSIANA FEBRIANY) Biaya pembelian bahan bakar kendaraan dians roda 4 (empat) BM 1927 Ap	0,00	600.000,00	24.621.286,00
05/06/2024	00499/KW/098849/2024	Ipong (LUSIANA FEBRIANY) Blaya pembelian karung untuk sampah	0,00	76.000,00	24.545.286,00
05/06/2024	00497/KW/098849/2024	Rohimi (LUSIANA FEBRIANY) Biaya pembelian kunci lemari ruang pp	0,00	25.000,00	24.520.286,00
06/06/2024	00501/KW/098849/2024	Yuni (LUSIANA FEBRIANY) Biaya pembelian karpet karet paku sepanjang 6 meter	0,00	1.580.000,00	22.940.286,00
06/06/2024	00505/KW/098849/2024	Yuni (LUSIANA FEBRIANY) Biaya Pembelian Tempat Sampah	0,00	1.050.000,00	21.890.286,00
06/06/2024	00510/KW/098849/2024	Ependi (LUSIANA FEBRIANY) Biaya pemasangan stop kontak exosfan , pemasangan kabel dan stop kontak	0,00	950.000,00	20.940.286,00
06/06/2024	00508/KW/098849/2024	Misran (LUSIANA FEBRIANY) Cetak Spanduk	0,00	850.000,00	20.090.286,00
06/06/2024	00512/KW/098849/2024	Riky (LUSIANA FEBRIANY) Biaya pembelian bahan bakar kendaraan dians roda 4 (empat) BM 1271 A	0,00	610.000,00	19.480.286,00
06/06/2024	00513/KW/098849/2024	Tarudin (LUSIANA FEBRIANY) Biaya perbaikan instalasi listrik dan pergantian auto breaker	0,00	500.000,00	18.980.286,00
06/06/2024	00509/KW/098849/2024	Misran (LUSIANA FEBRIANY) Biaya pembelian mic standar	0,00	500.000,00	18.480.286,00
06/06/2024	00506/KW/098849/2024	Yuni (LUSIANA FEBRIANY) Biaya pembelian bunga keladi	0,00	500.000,00	17.980.286,00
06/06/2024	00504/KW/098849/2024	Misran (LUSIANA FEBRIANY) Biaya cetak spanduk pelantikan	0,00	350.000,00	17.630.286,00

Tgl	No Bukti	Uraian	Debet (Rp.)	Kredit (Rp.)	Saldo (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		panitera 4x2,5			
06/06/2024	00500/KW/098849/2024	Abak Jaya (LUSIANA FEBRIANY) Biaya pembelian air minum untuk ptsp dan pimpinan	0,00	228.000,00	17.402.286,00
06/06/2024	00507/KW/098849/2024	Yuni (LUSIANA FEBRIANY) Biaya pembelian permen untuk ptsp	0,00	166.000,00	17.236.286,00
06/06/2024	00502/KW/098849/2024	Andri (LUSIANA FEBRIANY) Biaya pemeliharaan kendaraan dinas roda 2 (dua) BM 2727 TP	0,00	131.500,00	17.104.786,00
06/06/2024	00503/KW/098849/2024	Yudha (LUSIANA FEBRIANY) Blaya pemeliharaan kendaraan dinas roda 2 (dua) BM 2175 TP	0,00	77.000,00	17.027.786,00
06/06/2024	00511/KW/098849/2024	Yudha (LUSIANA FEBRIANY) Biaya pembelian bahan bahan bakar kendaraan dinas roda 2 (dua) BM 2175 TP	0,00	38.100,00	16.989.686,00
07/06/2024	00515/KW/098849/2024	Dedy (LUSIANA FEBRIANY) Blaya pemeliharaan service kendaraan dinas roda 4 (empat) BM 1927 TP	0,00	1.325.000,00	15.664.686,00
07/06/2024	00519/KW/098849/2024	Riky (LUSIANA FEBRIANY) Biaya pembelian bahan bakar kendaraan dinas roda 4 (empat) BM 1271	0,00	600.000,00	15.064.686,00
07/06/2024	00518/KW/098849/2024	Junedi (LUSIANA FEBRIANY) Biaya pemeliharaan printer ruang hukum	0,00	400.000,00	14.664.686,00
07/06/2024	00514/KW/098849/2024	Bayu (LUSIANA FEBRIANY) Biaya pembelian bahan bakar kendaraan dians roda 4(empat) BM 1783 TP	0,00	400.000,00	14.264.686,00
07/06/2024	00517/KW/098849/2024	Erry (LUSIANA FEBRIANY) Biaya pembelian bahan bakar kendaraan dinas roda 4 (empat) BM 1470 TP	0,00	350.000,00	13.914.686,00
07/06/2024	00520/KW/098849/2024	Randa (LUSIANA FEBRIANY) Biaya pembelian bahan bakar kendaraan dinas roda 4 (empat) BM 1957 AP	0,00	300.000,00	13.614.686,00
07/06/2024	00516/KW/098849/2024	Cantopra (LUSIANA FEBRIANY) Biaya pemeliharaan kendaraan dinas roda 4 (empat) BM 1578 TP	0,00	275.000,00	13.339.686,00
07/06/2024	00521/KW/098849/2024	Taruddin (LUSIANA FEBRIANY) Blaya pembelian bahan bakar kendaraan dinas roda 2 (dua) BM 3054 TP	0,00	95.000,00	13.244.686,00

		Jumlah	0,00	31.790.314,00	13.209.686,00
--	--	--------	------	---------------	---------------

Kuasa Pengguna Anggaran



ERRY MARDIANTO, ST, SH
NIP 197603012005021001

KOTA PEKANBARU, 10 Juni 2024

Bendahara Pengeluaran,



LUSIANA FEBRIANY

Penata /198802282011012012 198802282011012012



INFORMASI VIRTUAL ACCOUNT

MAHKAMAH AGUNG (005)

BADAN URUSAN ADMINISTRASI (01)

PENGADILAN NEGERI PEKANBARU (098849)

Rekening Induk : RKK BUA MA OPS (032901xxxxx304)

Virtual Account : 653240988491000 | BPG 008 PENGADILAN NEGERI PEKANBARU 098849

Periode : 01-06-2024 s/d 10-06-2024

TanggalTransaksi	JamTransaksi	ID Transaksi	Remarks	Saldo Awal	Debit	Kredit	Saldo Akhir	Channel	Klasifikasi
2024-05-28	.	.	.	0,00	0,00	0,00	0,00		
Total Mutasi					0,00	0,00			
Saldo Akhir							0,00		

BERITA ACARA REGISTER PENUTUPAN KAS SATKER 099214

Pada hari ini, Senin tanggal 10 Juni 2024 , kami selaku Tim Pengawas Daerah Pengadilan Tinggi Riau telah melakukan pemeriksaan kas Bendahara Pengeluaran dengan rincian sebagai berikut:

Nama Penutup Kas / Pemegang Kas	Lusiana Febriany, S.Kom		
Tanggal Penutupan Kas Yang Lalu	30 Mei 2024		
Jumlah Penerimaan		Rp	27.000.000
Jumlah Pengeluaran		Rp	3.565.500
	Saldo Buku	Rp	23.434.500
	Saldo Bank	Rp	-
	Saldo Kas	Rp	23.434.500

Terdiri dari :

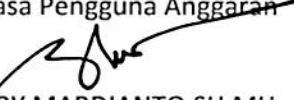
I. Uang Kas							
1	Lembaran uang kertas	Rp	100.000	x	100	lembar	= Rp 10.000.000
2	Lembaran uang kertas	Rp	50.000	x	227	lembar	= Rp 11.350.000
3	Lembaran uang kertas	Rp	20.000	x	101	lembar	= Rp 2.020.000
4	Lembaran uang kertas	Rp	10.000	x	4	lembar	= Rp 40.000
5	Lembaran uang kertas	Rp	5.000	x	4	lembar	= Rp 20.000
6	Lembaran uang kertas	Rp	2.000	x	2	lembar	= Rp 4.000
7	Lembaran uang kertas	Rp	1.000	x	0	lembar	= Rp -
							Rp 23.434.000
II. Uang Logam							
1	Uang Logam	Rp	1.000	x	0	keping	= Rp -
2	Uang Logam	Rp	500	x	1	keping	= Rp 500
3	Uang Logam	Rp	200	x		keping	= Rp -
4	Uang Logam	Rp	100	x	0	keping	= Rp -
							Rp 500
III. Kertas berharga dan tagihan kas yang diizinkan							= Rp -
Ordonansi / SPMU / SPM, Wesel, Cek, Saldo Bank,							
Materai dan lain sebagainya							
Jumlah I s/d III							Rp 23.434.500

Perbedaan : Rp -
Penjelasan :

Yang diperiksa
Bendahara Pengeluaran


LUSIANA FEBRIANY
NIP. 19880228 201101 2 012

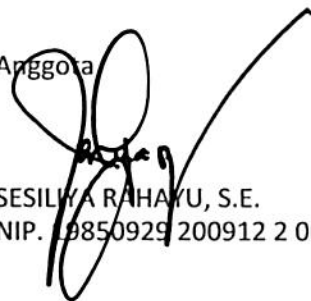
Mengetahui
Kuasa Pengguna Anggaran


ERRY MARDIANTO,SH.MH
NIP. 19760301 200502 1 001

Yang memeriksa,
1 Ketua Tim


NELSON SAMOSIR,SH.,MH
NIP. 19580125 198503 1 002

2 Anggota


SESILIA RAHAYU, S.E.
NIP. 19850929 200912 2 005

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN

Bulan: Juni 2024

Kementerian/Lembaga : (005) MAHKAMAH AGUNG

Unit Organisasi : (03) DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM

Provinsi/Kabupaten/Kota : (09.51) RIAU / KOTA PEKANBARU

Satuan Kerja : (099214) PENGADILAN NEGERI PEKANBARU

Alamat dan No Telp :

Tgl, No. SP : 24 November 2023 , DIPA-005.03.2.099214/2024

Tahun : 2024

KPPN : (008) Pekanbaru

I. Keadaan Pembukuan bulan pelaporan dengan saldo pada BKU sebesar Rp. 23.434.500,00 Dan Nomor Bukti terakhir Nomor. 00124/KW/099214/2024

	Jenis Buku Pembantu	Saldo Awal (Rp.)	Penambahan (Rp.)	Pengurangan (Rp.)	Saldo Akhir (Rp.)
1	2	3	4	5	6
A	BP Kas, BPP dan UM	27.000.000,00	0,00	3.565.500,00	23.434.500,00
	1. BP Kas (Tunai & Bank)	27.000.000,00	0,00	3.565.500,00	23.434.500,00
	2. BP UM (Voucher)	0,00	0,00	0,00	0,00
	3. BP BPP	0,00	0,00	0,00	0,00
B	BP Selain Kas	27.000.000,00	0,00	3.565.500,00	23.434.500,00
	1. BP UP*)	27.000.000,00	0,00	3.565.500,00	23.434.500,00
	2. BP TUP*)	0,00	0,00	0,00	0,00
	3. BP LS-Bendahara	0,00	0,00	0,00	0,00
	4. BP Pajak	0,00	0,00	0,00	0,00
	5. BP Hibah	0,00	0,00	0,00	0,00
	6. BP Lain-lain	0,00	0,00	0,00	0,00

*) jumlah pengurangan sudah termasuk kuitansi UP yang belum di-SPM-kan sebesar Rp. 3.565.500,00

*) jumlah pengurangan sudah termasuk kuitansi TUP yang belum di-SPM-kan sebesar Rp. 0,00

II. Keadaan kas pada akhir Bulan Pelaporan

1. Uang Tunai di Brankas	Rp.	23.434.500,00	
2. Uang di Rekening Bank	Rp.	0,00	(terlampir salinan rekening koran)
3. Jumlah Kas	Rp.	23.434.500,00	

III. Selisih Kas

1. Saldo Akhir BP Kas	Rp.	23.434.500,00
2. Jumlah Kas (II.3)	Rp.	23.434.500,00
3. Selisih Kas	Rp.	0,00

IV. Hasil Rekonsiliasi Internal dengan UAKPA

A. UP

1. Saldo UP	Rp.	23.434.500,00
2. Kwitansi UP belum di SPJ-kan	Rp.	3.565.500,00
3. Jumlah Saldo dan Kwitansi UP	Rp.	27.000.000,00
4. Saldo UP menurut UAKPA	Rp.	27.000.000,00
5. Selisih Pembukuan UP	Rp.	0,00

B. TUP

1. Saldo TUP	Rp.	0,00
2. Kwitansi TUP belum di SPJ-kan	Rp.	0,00
3. Jumlah Saldo dan Kwitansi TUP	Rp.	0,00
4. Saldo TUP menurut UAKPA	Rp.	0,00
5. Selisih Pembukuan TUP	Rp.	0,00

C. Lainnya

1. Saldo Lainnya	Rp.	0,00
2. Saldo Lainnya Menurut UAKPA	Rp.	0,00
3. Selisih Pembukuan Lainnya	Rp.	0,00

V. Penjelasan Selisih Kas dan / atau selisih pembukuan UP (apabila ada)

- 1.
- 2.

Mengetahui
Kuasa Pengguna Anggaran



ERRY MARDIANTO, ST, SH
NIP 197603012005021001

KOTA PEKANBARU, Juni 2024
Bendahara Pengeluaran



LUSIANA FEBRIANY, S.KOM.
NIP 198802282011012012

Hasil Pemeriksaan Kas

Pada hari ini, ~~Senin~~ ⁷ tanggal ~~28~~ ¹⁰ bulan Juni tahun 2024, kami selaku Kuasa Pengguna Anggaran telah melakukan pemeriksaan kas Bendahara Pengeluaran dengan nomor rekening 654440992141000 dengan posisi saldo Buku Kas Umum sebesar Rp. 23.434.500 dan Nomor Bukti terakhir Nomor : 00124/KW/099214/2024

I. Hasil Pemeriksaan Pembukuan Bendahara

A. Saldo Kas Bendahara

1	Saldo BP Kas (Tunai dan Bank)	Rp.	23.434.500
2	Saldo BP UM (Voucher)	Rp.	0
3	Saldo BP BPP	Rp.	0
4	Jumlah (A1+A2+A3)	Rp.	23.434.500

B. Saldo Kas tersebut pada huruf A terdiri dari :

1	Saldo BP UP	Rp.	23.434.500
2	Saldo BP TUP	Rp.	0
3	Saldo LS-Bendahara	Rp.	0
4	Saldo Pajak	Rp.	0
5	Saldo Hibah	Rp.	0
6	Saldo BP Lain-lain	Rp.	0
7	Jumlah (B1+B2+B3+B4+B5+B6)	Rp.	23.434.500

C.	Selisih pembukuan (A4-B6)	Rp.	0
----	---------------------------	-----	---

II. Hasil Pemeriksaan Kas (Fisik)

A. Kas yang dikuasai bendahara

1	Uang Tunai di Kas Bendahara	Rp.	23.434.500
2	Uang di Rekening Bendahara	Rp.	0
3	Jumlah Kas (A1+A2)	Rp.	23.434.500

B.	Selisih Kas (I.A.I-II.A.3)	Rp.	0
----	----------------------------	-----	---

III. Hasil Rekonsiliasi Internal

A. Pembukuan menurut Bendahara

1	a.	Saldo UP	Rp.	23.434.500
	b.	Kuitansi UP yang belum di-SPM-kan	Rp.	3.565.500
	c.	Jumlah Saldo dan Kuitansi UP	Rp.	27.000.000
2	a.	Saldo TUP	Rp.	0
	b.	Kuitansi TUP yang belum di-SPM-kan	Rp.	0
	c.	Jumlah Saldo dan Kuitansi TUP	Rp.	0
3		Saldo Lainnya	Rp.	0
4		Jumlah (A1+A2+A3)	Rp.	27.000.000

B. Pembukuan menurut UAKPA

1	Kas UP di Bendahara	Rp.	27.000.000
2	Kas TUP di Bendahara	Rp.	0
3	Kas Lainnya di Bendahara	Rp.	0
4	Jumlah (B1+B2+B3)	Rp.	27.000.000

C.	Selisih Pembukuan Bendahara dengan UAKPA (III.A.4-III.B.4)	Rp.	0
----	---	-----	---

IV. Penjelasan atas selisih

A. Selisih Kas (II.B)

B. Selisih Pembukuan UP (III.C)

Yang diperiksa
Bendahara Pengeluaran

LUSIANA FEBRIANY, S.KOM.
NIP 198802282011012012

Mengetahui
Kuasa Pengguna Anggaran

ERRY MARDIANTO, ST, SH
NIP 197603012005021001

BUKU KAS UMUM

Periode Juni 2024

Departemen/Lembaga	: (005) MAHKAMAH AGUNG
Unit Organisasi	: (03) DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
Propinsi/Kabupaten/Kota	: (09.51) RIAU / KOTA PEKANBARU
Satuan Kerja	: (099214) PENGADILAN NEGERI PEKANBARU
Tanggal, No SP DIPA	: 28 November 2023, DIPA-005.03.2.099214/2024
Jumlah Pagu Per Kelompok Belanja	: (52) Rp. 548.190.000,00
Tahun Anggaran	: 2024
KPPN	: (008) Pekanbaru

Mengetahui
 Kuasa Pengguna Anggaran



ERRY MARDIANTO, ST, SH
 NIP 197603012005021001

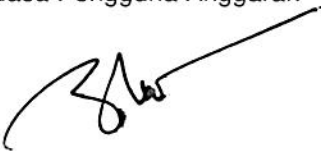
KOTA PEKANBARU, 10 Juni 2024
 Bendahara Pengeluaran,



LUSIANA FEBRIANY, S.KOM.
 NIP 198802282011012012

Tgl	No Bukti	Uraian	Debet (Rp.)	Kredit (Rp.)	Saldo (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Saldo Akhir Bulan Mei 2024			27.000.000,00
06/06/2024	00121/KW/099214/2024	Misran (LUSIANA FEBRIANY) Biaya pembayaran penjiildtan berkas pidana	0,00	1.389.000,00	25.611.000,00
06/06/2024	00116/KW/099214/2024	Victor (LUSIANA FEBRIANY) Biaya pembelian konsumsi dilaur jam kerja perkara tipikor	0,00	600.000,00	25.011.000,00
06/06/2024	00122/KW/099214/2024	Misran (LUSIANA FEBRIANY) Blaya pembayaran penjiildtan berkas PHI	0,00	370.000,00	24.641.000,00
06/06/2024	00117/KW/099214/2024	Prima (LUSIANA FEBRIANY) Biaya pengiriman pos berkas PHI	0,00	301.500,00	24.339.500,00
06/06/2024	00120/KW/099214/2024	Misran (LUSIANA FEBRIANY) Biaya pembaayran perkara tipikor	0,00	185.000,00	24.154.500,00
06/06/2024	00118/KW/099214/2024	Victor (LUSIANA FEBRIANY) Biaya pembelian konsumsk diluar jam kerja perkara tipikor	0,00	180.000,00	23.974.500,00
07/06/2024	00124/KW/099214/2024	Misran (LUSIANA FEBRIANY) Biaya pembaayran penjiildtan berkas pidana	0,00	300.000,00	23.674.500,00
07/06/2024	00123/KW/099214/2024	Misran (LUSIANA FEBRIANY) Biaya pembayaran penjiildtan berkas tipikor	0,00	240.000,00	23.434.500,00
		Jumlah	0,00	3.565.500,00	23.434.500,00

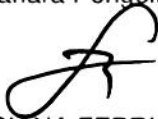
Kuasa Pengguna Anggaran



ERRY MARDIANTO, ST, SH
NIP 197603012005021001

KOTA PEKANBARU, 10 Juni 2024

Bendahara Pengeluaran,



LUSIANA FEBRIANY
Penata Muda Tk.I /198802282011012012
198802282011012012



INFORMASI VIRTUAL ACCOUNT

MAHKAMAH AGUNG (005)
DITJEN BADAN PERADILAN UMUM (03)
PENGADILAN NEGERI PEKANBARU (099214)
Rekening Induk : RKK DITJEN BADILUM O (023001xxxxxx304)
Virtual Account : 654440992141000 | BPG 008 PN PEKANBARU
Periode : 01-06-2024 s/d 10-06-2024

TanggalTransaksi	JamTransaksi	ID Transaksi	Remarks	Saldo Awal	Debit	Kredit	Saldo Akhir	Channel	Klasifikasi
2024-05-28	.	.	.	0,00	0,00	0,00	0,00		
Total Mutasi					0,00	0,00			
Saldo Akhir							0,00		

DOKUMENTASI KEGIATAN







